

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---



**KEBIJAKAN ANGGARAN DAN FISKAL DALAM MENDUKUNG  
ORGANISASI MILITER**

Oleh :

**KP SANJEEWA ANURADHA FERNANDO**  
**BRIGADIR JENDRAL (SRI LANKA)**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)  
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXI  
LEMHANNAS RI  
TAHUN 2020**

## KATA PENGANTAR

Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan makalah Taskap ini dengan judul: **“KEBIJAKAN ANGGARAN DAN FISKAL DALAM MENDUKUNG ORGANISASI MILITER”**.

Makalah ini adalah salah satu persyaratan akademis bagi Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXI Tahun 2020 di Lemhannas RI. Berkat dorongan, perhatian dan kesabaran dari Tutor Taskap, **Marsekal Muda TNI Julexl Tambayong** serta masukan dari rekan-rekan peserta PPRA LXI, makalah ini dapat diselesaikan kurang- lebih tepat pada waktunya. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu.

Saya sangat menyadari bahwa makalah ini masih belum sempurna, lagipula dirumuskan dalam jangka waktu yang terbatas oleh seorang peserta mancanegara, dan masih banyak hal yang memerlukan perbaikan untuk penyempurnaan. Oleh karena itu koreksi serta saran-saran konstruktif dari semua pihak akan selalu saya terima dengan sangat senang hati.

Menyadari kekurangan-kekurangan tersebut, maka harapan besar saya adalah makalah ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkan.



Jakarta, September 2020

Penulis

Kumarapatabendige Sanjeewa Anurdha Fernando RWP RSP  
Brigadir Jendral (Sri Lanka)

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kumarapatabendige Sanjeewa Anurdha Fernando RWP RSP

Pangkat : Brigadir Jendral

Jabatan : Komandan Brigade

Instansi : Tentara Darat Sri Lanka

Alamat : Markas Besar Tentara Sri Lanka

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXI tahun 2020 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Jakarta, September 2020

Penulis

KP Sanjeewa Anurdha Fernando

---

Brigadir Jendral (Sri Lanka)

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---

**LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP**

Yang bertanda tangan di bawah ini Tutor Taskap dari:

Nama : KP Sanjeewa Anurdha Fernando

Peserta: Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXI Tahun 2020

Judul Taskap: **KEBIJAKAN ANGGARAN DAN FISKAL DALAM MENDUKUNG ORGANISASI MILITER.**

Taskap tersebut di atas telah ditulis "~~sesuai/tidak sesuai~~" dengan Petunjuk Teknis Tentang Penulisan Ilmiah Peserta Pendidikan Lemhannas RI Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2020 tanggal 6 Januari 2020, karena itu "~~layak/tidak layak~~" dan "~~disetujui/tidak disetujui~~" untuk diuji.

"~~coret yang tidak diperlukan~~"

Jakarta, September 2020



  
Tutor Taskap

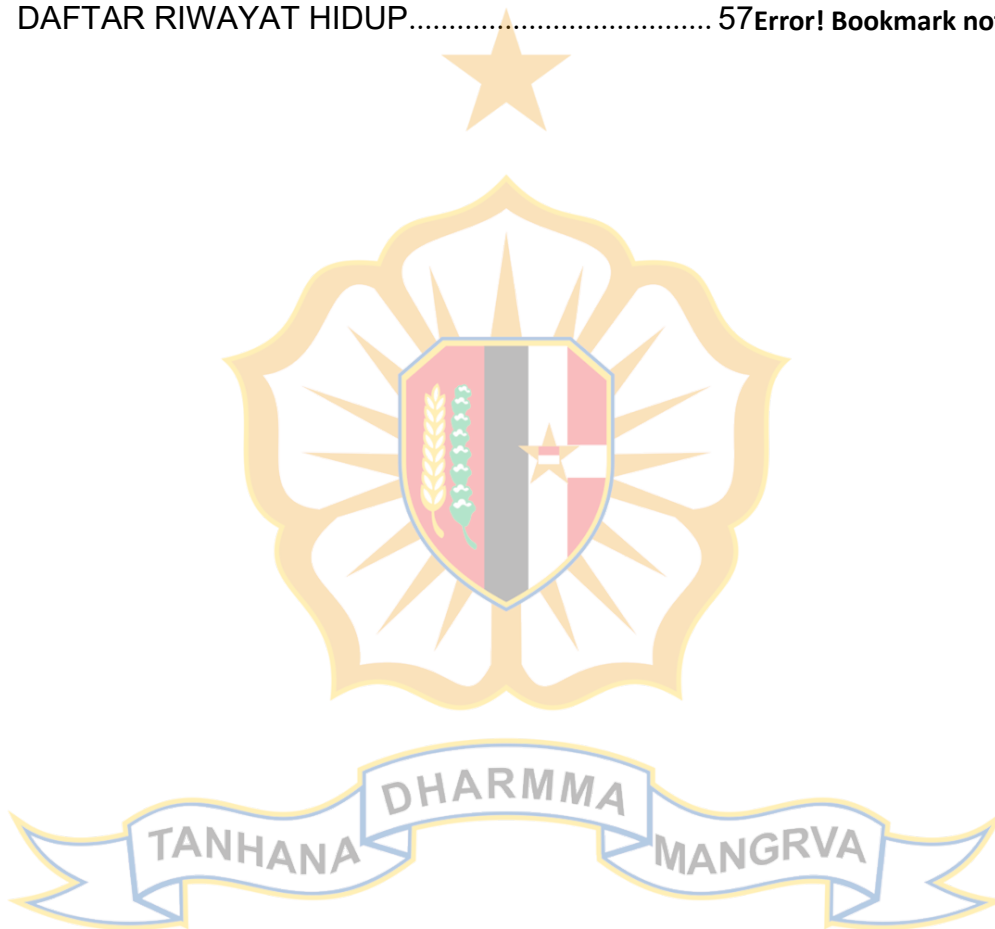
Julexi Tambayong

Marsekal Muda TNI

## DAFTAR ISI

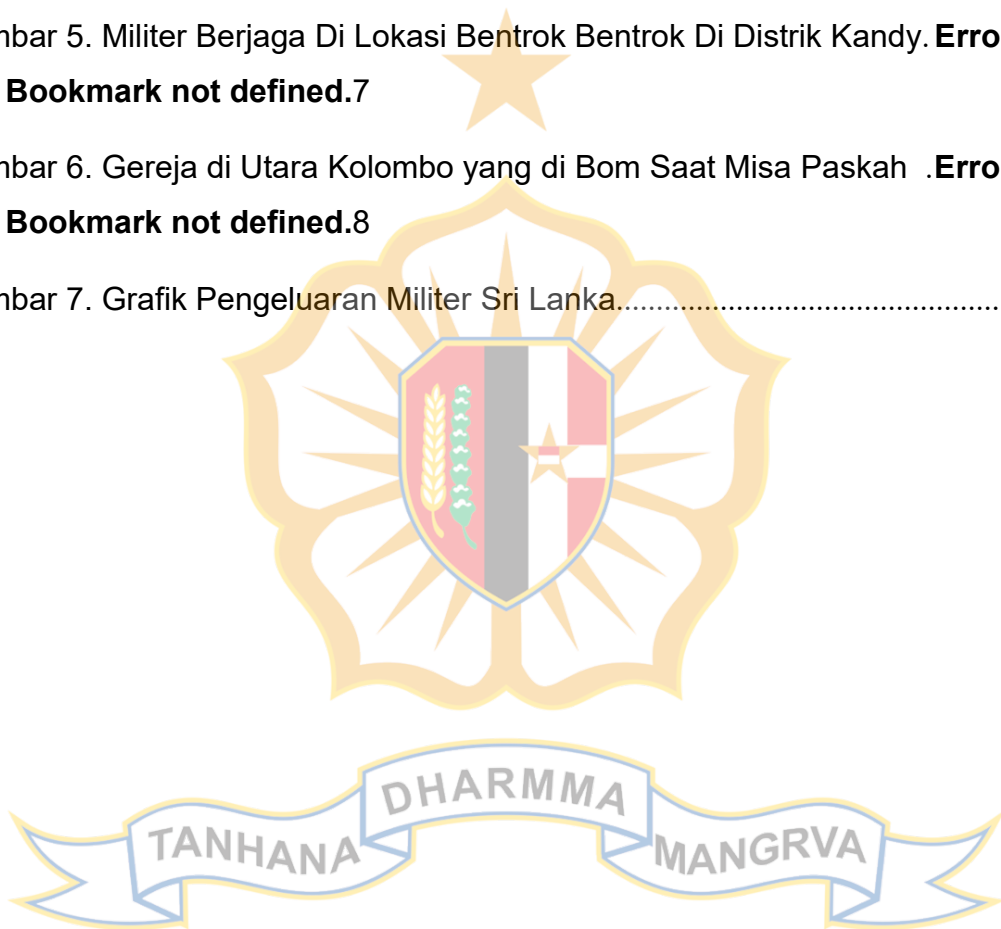
KATA PENGANTAR.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN TUTOR.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	4
3. Maksud Dan Tujuan.....	4
4. Ruang Lingkup Dan Sistematika.....	5
5. Metode Dan Pendekatan.....	6
6. Pengertian-Pengertian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
7. Umum.....	10
8. Peraturan Perundangan-undangan.....	10
9. Kerangka Teoritis.....	11
10. Lingkungan Strategis.....	14
11. Data dan Fakta.....	18
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.1</b>
12. Umum.....	21
13. Bagaimana Kebijakan Anggaran dan Fiskal Negara Sri Lanka dalam Mendukung Organisasi Militer Ditinjau dari Prinsip-prinsip Good Governance.....	21
14. Seberapa Besar Pengaruh Politik Terhadap Kebijakan Anggaran Organisasi Militer Sri Lanka.....	32

15. Apa Urgensinya Kebijakan Anggaran dan Fiskal dalam Mendukung Organisasi Militer Sri Lanka.....	42
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
BAB IV PENUTUP.....	49
17. Kesimpulan.....	49
18. Rekomendasi.....	50
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
ALUR PIKIR.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	57
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pelabuhan Sri Lanka yang di Danai China.....	15
Gambar 2. Tentara Sri Lanka Saat Melakukan Operasi Mencari Bahan Peledak.	23
Gambar 3. Peta Negara Sri Lanka.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b> 4
Gambar 4. Pertumbuhan Ekonomi Sri Lanka tahun 2015-2018.....	33
Gambar 5. Militer Berjaga Di Lokasi Bentrok Bentrok Di Distrik Kandy. <b>Error!</b> <b>Bookmark not defined.</b>	7
Gambar 6. Gereja di Utara Kolombo yang di Bom Saat Misa Paskah . <b>Error!</b> <b>Bookmark not defined.</b>	8
Gambar 7. Grafik Pengeluaran Militer Sri Lanka.....	39



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Sri Lanka adalah sebuah negara pulau yang terletak di Benua Asia bagian Selatan. Secara astronomis negara ini berada di antara 5°-10°LU dan 79°-82°BT yang berbatasan laut dengan India di sebelah Barat dan Utaranya, sedangkan sebelah Barat Daya berbatasan dengan Maladewa.

Letaknya yang strategis, tak hanya menguntungkan negara Sri Lanka secara ekonomi, tetapi juga sekaligus menjadi tantangan yang besar dan cukup kompleks. Terutama jika dilihat dari aspek geopolitik dan geostrategi negara ini. Apalagi dalam 5 tahun terakhir ini negara Sri Lanka sedang mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, hal ini tentu semakin membuatnya menjadi incaran banyak pihak yang berkepentingan, baik untuk kepentingan ekonomi maupun politik regional.

Beberapa industri penting Sri Lanka diantaranya seperti Industri perkapalan, tekstil, semen, pengolahan minyak, konstruksi dan jasa teknologi informasi, asuransi, perbankan, pariwisata. Di samping perindustrian, sektor pertanian juga merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Sri Lanka, komoditas penting pertanian Sri Lanka diantaranya seperti teh, tebu, biji-bijian, beras, bumbu-bumbuan, karet, kelapa, tembakau, buah-buahan, sayur-sayuran, daging sapi, telur dan ikan.

Atas keunggulan di bidang sumber daya alam dan industri negara dengan luas wilayah 65.610 km<sup>2</sup> ini inilah yang mencuri hati berbagai pihak. Letaknya yang strategis membuatnya mudah dan rentan dari ancaman dari luar. Apalagi situasi politik global saat ini yang terus memanas. Dimana ancaman terhadap sebuah negara tidak hanya berupa serangan terbuka militer dari negara lain atau pengerahan kekuatan militer dalam bentuk perang terbuka, tetapi juga perang asimetris yang menjadi tantangan hampir semua negara di dunia saat ini. Demikian juga negara Sri Lanka dengan posisinya yang secara geografis sangat strategis. Keadaannya itu membuat Sri Lanka dikelilingi oleh konflik baik di tingkat global dan maupun regional, seperti konflik di sekitar Asia Selatan dan negara-



negara tetangga Sri Lanka lainnya. Bahkan konflik antara China dan India dapat berpengaruh kepada keamanan negara kecil seperti Sri Lanka yang merupakan *center of point* di kawasan tersebut.

Untuk itu Negara Sri Lanka telah menyiapkan benteng pertahanan negaranya yaitu dengan kekuatan bersenjata sebanyak 346.700 anggota personel aktif yang siap menjaga keamanan dan pertahanan Negara. Kementerian Pertahanan (Dephan), adalah yang mengatur keseluruhan kesatuan militer Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka. Angkatan bersenjata Sri Lanka meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Jumlah Angkatan Darat Srilanka sekitar 203.000 personel reguler dan 73.000 termasuk cadangan yang bertugas menjadi pengawal Nasional dan bertanggung jawab untuk mengawasi operasi militer dan kemanusiaan di darat. Saat ini tentara Sri Lanka mengerahkan 7 Markas Besar Pasukan Keamanan (Setara dengan Corp), 22 divisi dan membentuk 2 divisi pasukan serang ketika melakukan operasi tempur, dan 72 Brigade<sup>1</sup>. Sejak 2004 lalu Angkatan Darat Sri Lanka turut membangun satu batalion dan unit pendukung untuk sekitar 1000 personel dalam operasi penjaga perdamaian PBB di Haiti. Begitupun Angkatan laut, adalah angkatan pertahanan paling vital di Sri Lanka, yang selalu siap siaga dengan sekitar 48.000 personel. Angkatan Udara dengan 28.700 personel, belum lama ini angkatan udara Sri Lanka telah berkembang terutama dalam memberikan dukungan udara untuk pasukan darat dan pasukan pendarat dan membawa serangan udara di daerah yang dikuasai pemberontak di provinsi Utara dan Timur.

Tidak hanya Sri Lanka, negara manapun di dunia setiap angkatan bersenjata wajib dibekali dengan perangkat keras militer dan kebutuhan militer lainnya. Pemenuhan kebutuhan tersebut membutuhkan anggaran militer yang tentu tidak sedikit. Anggaran militer atau pengeluaran militer juga dikenal sebagai anggaran pertahanan, yaitu jumlah sumber daya keuangan yang didedikasikan oleh negara untuk meningkatkan dan mempertahankan angkatan bersenjata atau metode lain yang penting untuk tujuan pertahanan. Anggaran militer tak hanya mencerminkan kekuatan suatu negara dalam menghadang kemungkinan ancaman dari dalam dan luar negeri seperti agresi dan sparatisme, tetapi juga menggambarkan politik

---

<sup>1</sup> Update data dari "Sri Lanka Army Establishment" (<https://www.army.lk/establishment>, Diakses pada 07 Juli 2020, pukul 19.15)

keamanan sebuah negara. Dalam hal ini Sri Lanka adalah salah satu negara yang tak pernah sepi dari konflik. Mulai dari perang sipil, sparatisme hingga serangan *Islamic State of Iraq and Suriah* (ISIS). Karena itu, kebijakan anggaran yang cukup dirasakan perlu untuk situasi dan kondisi Sri Lanka saat ini.

Dibandingkan Belanda yang jumlah penduduk dan luas wilayahnya lebih kecil dari Sri Lanka berani mengalokasikan anggaran militernya sekitar €10.860 billion atau setara dengan US\$12.419 billion. Sedangkan Singapura yang negaranya jauh lebih kecil lagi, belanja angkatan bersenjatanya mencapai 17,09% (US\$ 10,81 miliar) dari total anggaran belanja negara mereka tahun 2018. Karena itu Singapura menyandang predikat negara yang belanja militernya paling besar di kawasan Asia Tenggara (ASEAN)<sup>2</sup>. Sementara Sri Lanka yang total luas wilayah 65.610 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sekitar 22.409.381 jiwa cuma berani mengalokasikan anggaran militernya sekitar US\$1,8 miliar saja atau sekitar 1,94% dari GDP pada tahun 2019. Dengan kata lain, sejak 5 tahun terakhir anggaran belanja militernya semakin menyusut. Sebab pada tahun 2015 belanja militer Sri Lanka masih sekitar 2,55% dari GDP.<sup>3</sup>

Apabila melihat pertumbuhan ekonomi negara Sri Lanka secara keseluruhan adalah cukup baik. Selama 2010-2015, rata-rata pertumbuhan ekonomi Sri Lanka di angka 6,4%. Bahkan pada tahun 2012 sempat mencapai angka tertinggi yang pernah diraih negara tersebut yaitu 9,1% walau kemudian mengalami penurunan yang cukup tajam karena dampak bencana pandemi Covid-19 awal 2020, namun secara makro ekonomi negara Sri Lanka tetap tumbuh dengan cukup baik.

Pertumbuhan ekonomi ini seharusnya berkolerasi dengan kemampuan suatu negara. Berkenaan dengan itu pengalokasian anggaran belanja militer yang memadai adalah sangat penting dalam rangka keselamatan negara tersebut dari berbagai Ancaman Gangguan Hambatan dan Tantangan (ATHG) yang berpotensi mengganggu keamanan serta kedaulatan negara Sri Lanka. Dalam batas minimum yang disarankan, belanja militer sebuah negara sekurang-kurangnya berkisar

<sup>2</sup> Viva Budy Kusnandar, "Anggaran Belanja Militer Singapura 2018 Terbesar di ASEAN" (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/12/anggaran-belanja-militer-singapura-2018-terbesar-di-asean>, Diakses pada 24 Juli 2020, 22:31)

<sup>3</sup> Military expenditure as a share of GDP, (<https://knoema.com/atlas/Sri-Lanka/Military-expenditure-as-a-share-of-GDP>, Diakses pada 24 Juli 2020, 22:28)

pada angka 2,5% dari GDP<sup>4</sup>. Untuk level yang lebih tegas, pengamat Pengamat militer dari Universitas Muhammadiyah Malang Muhadjir Effendi menganjurkan untuk mendekati ideal, paling tidak negara mesti mengalokasikan 8% -10%, dari APBN-nya, seperti porsi anggaran untuk kesehatan 10%, dan pendidikan 20% di dalam APBN Indonesia.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang, dan kompleksnya persoalan yang dihadapi oleh negara Sri Lanka maka penulis merumuskan masalah dalam tugas ilmiah Perseorangan (Taskap) ini, adalah **“Bagaimana Kebijakan Anggaran Dan Fiskal Dalam Mendukung Organisasi Militer“**, dengan tiga pertanyaan kajian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kebijakan anggaran dan fiskal Negara Sri Lanka untuk mendukung organisasi militer ditinjau dari prinsip-prinsip good governance?
- 2) Seberapa besar pengaruh politik terhadap kebijakan anggaran organisasi militer Sri Lanka?
- 3) Apa urgensinya kebijakan anggaran dan fiskal dalam mendukung organisasi militer Negara Sri Lanka?

## 3. Maksud Dan Tujuan

### a. Maksud.

Maksud penulisan Taskap ini adalah untuk memberikan gambaran tentang kebijakan anggaran dan fiskal dalam mendukung organisasi militer negara Sri Lanka.

### b. Tujuan.

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada para pengambil kebijakan di lembaga militer, lembaga politik maupun kementerian terkait kebijakan anggaran dan fiskal di negara Sri Lanka,

<sup>4</sup> Maya Ayu Puspitasari, *“Anggaran Militer Dianggap Belum Ideal”* (<https://koran.tempo.co/read/nasional/441245/anggaran-pertahanan-dinilai-belum-ideal?>, Diakses pada 24 Juli 2020, 22:23)

terutama dalam mendukung pengembangan dan memperkuat organisasi militer dalam menghadapi berbagai persoalan baik tingkat nasional, regional maupun global.

#### **4. Ruang Lingkup dan Sistematika**

##### **a. Ruang Lingkup.**

Mengingat luasnya ruang lingkup isu mengenai keuangan dan kebijakan anggaran, maka dalam taskap ini akan membahas sejumlah problematika yang terkait dengan politik anggaran dan kebijakan pemerintah dalam memberikan dukungan terhadap organisasi militer negara Sri Lanka saja. Serta melihat berbagai pengaruh global, regional dan nasional serta paradigma dalam negeri yang mempengaruhi kebijakan anggaran di Sri Lanka.

##### **b. Sistematika.**

Sistematika penulisan Taskap ini terdiri atas beberapa bagian atau bab, setiap bab tersebut memuat uraian hal-hal yang berkaitan dengan tema penyusunan Taskap. Tata urutan dan sistematika penulisan menjelaskan isi masing-masing bab dan keterkaitan antara bab satu dengan bab lainnya.

###### **1) BAB I Pendahuluan**

Dalam Bab ini berisi uraian latar belakang penulisan, perumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan yang digunakan, serta beberapa pengertian untuk dapat menyamakan persepsi untuk memahami masalah yang dibahas di dalam Taskap.

###### **2) BAB II Tinjauan Pustaka**

Bab ini akan menguraikan tentang dasar-dasar pemikiran penulisan, di antaranya adalah kebijakan anggaran maupun fiskal yang berlaku terkait organisasi militer negara Sri Lanka, pemetaan data dan fakta serta kerangka teoritis yang bersumber dari kajian pustaka maupun referensi ilmiah, peraturan perundang-undangan terkait dengan materi bahasan. Selanjutnya akan diuraikan juga pengaruh internal dan

eksternal, baik lokal, maupun global di negara Sri Lanka terkait anggaran organisasi militer.

### 3) BAB III Pembahasan

Dalam Bab ini akan dianalisis secara detail pokok-pokok bahasan dan pertanyaan penelitian terkait kebijakan anggaran dan fiskal dalam mendukung organisasi militer. Pembahasan yang dilakukan tersebut harus merujuk dari teori dan tinjauan pustaka sebagaimana uraian di bab sebelumnya. Hasil analisis ini nantinya akan dirumuskan untuk pemecahan masalah yang ada pada pokok bahasan dengan memberikan solusi yang logis, kongkrit dan kontekstual.

### 4) BAB IV Penutup

Pada Bab ini penulis akan menyampaikan kesimpulan apa saja yang diperoleh setelah membuat analisis di Bab sebelumnya, serta memberikan sejumlah rekomendasi kepada para pembaca, dan terutama pemangku kepentingan di Sri Lanka sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dalam hal kebijakan anggaran dan fiskal dalam upaya mendukung organisasi militer.

## 5. Metode dan Pendekatan

Dalam penulisan Taskap ini kami menggunakan metode deskriptif analitis. Kami akan menyajikan data maupun informasi yang berkaitan dengan materi permasalahan serta membuat analisis yang didasarkan pada tinjauan kepustakaan (library research), literatur di internet, dan masukan lisan dari para narasumber bidang terkait dengan pisau analisis Ketahanan Nasional.

## 6. Pengertian-Pengertian

Untuk memudahkan pembaca memahami dalam satu bingkai persepsi Taskap ini, maka penulis mencantumkan beberapa pengertian yang dianggap perlu dan relevan sebagai berikut :

### a. Anggaran

Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif (satuan jumlah) periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa. Menurut Nicolae Todea & Anca Calin (2010), anggaran adalah instrumen manajemen yang digunakan oleh entitas mana pun, yang secara finansial memastikan dimensi tujuan, pendapatan, pengeluaran, dan hasil di tingkat pusat manajemen dan akhirnya mengevaluasi efisiensi ekonomi dengan membandingkan hasilnya dengan yang dianggarkan.<sup>5</sup>

### b. Kebijakan Fiskal

Asal usul kata fiskal adalah dari Bahasa Latin yaitu *fiscus*, diambil dari nama seorang pemegang kuasa keuangan pada zaman Romawi kuno yang secara harafiah diterjemahkan sebagai tas atau keranjang. Dalam bahasa Inggris *fiscal* berarti pembendaharaan atau pengaturan keluar masuknya uang dalam kerajaan. Sementara dalam bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan Negara. Maka menurut Zaini Ibrahim, "Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah."<sup>6</sup> Sementara itu menurut Sudono Sukirno (2003) kebijakan anggaran adalah suatu teknik untuk mengubah pengeluaran atau penerimaan negara saat kondisi perekonomian menurun baik karena inflasi atau deflasi.<sup>7</sup> Dengan demikian Kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran dalam tulisan ini dapat diartikan sebagai suatu kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran negara Sri Lanka.

<sup>5</sup> Nicolae Todea dan Anca Calin , "The Budget, An Instrument For Planning, 2010, Annals of the University of Oradea: Economic Scienc", Annals of Faculty of Economics, vol. 1 No. 2, 2010, hal.1

<sup>6</sup> Zaini Ibrahim, "Pengantar Ekonomi Makro, (Lembaga Peneelitan dan Pengabdian Kepada Masyarakat", IAIN Sultan Maulana Hasanudin, Banten, 2013, hal. 193.

<sup>7</sup> Ramadhitya, Tinjauan pustaka model anggaran, (<http://digilib.unila.ac.id/1> Diakses pada 24 Juli 2020, 22:10)



### c. Politik Anggaran

Politik anggaran adalah penetapan berbagai kebijakan tentang proses anggaran yang mencakup berbagai pertanyaan bagaimana pemerintah membiayai kegiatannya; bagaimana uang publik didapatkan, dikelola dan didistribusikan; siapa yang diuntungkan dan dirugikan; peluang-peluang apa saja yang tersedia baik untuk penyimpangan negati maupun untuk meningkatkan pelayanan publik.<sup>8</sup> Karena sumber dana publik yang terbatas maka politik anggaran juga dapat diartikan suatu proses saling mempengaruhi antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam menentukan ukuran atau skala prioritas pembangunan dan mempengaruhi kebijakan alokasi anggaran.

### d. Organisasi Militer

Organisasi militer berasal dari dua gabungan kata yaitu *organisasi* dan *militer*. Organisasi adalah adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Sedangkan militer adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Maka organisasi militer jika didefinisikan adalah merupakan penataan angkatan bersenjata dari suatu negara sehingga dapat mengajukan kemampuan militernya sebagai kebijakan pertahanan nasional yang diperlukan. Dalam Taskap ini yang dimaksud organisasi militer adalah angkatan bersenjata dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata negara Srilangka.

### e. Negara

Dari sekian banyak definisi di dunia, penulis akan memilih definisi negara menurut Robert M MacIver. Dimana dia mengartikan negara adalah sebagai sebuah asosiasi yang menyelenggarakan ketertiban dalam suatu masyarakat pada suatu wilayah tertentu berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintahan. Namun untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan tersebut maka pemerintah diberi kekuatan

<sup>8</sup> Erin Damayanti , "Teori Politik Keuangan Publik Dan Kebijakan Anggaran", Universitas Brawijaya, 2015, hal. 7

yang bersifat memaksa<sup>9</sup>. Dalam tulisan ini maka negara yang dimaksud adalah negara Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka dan negara-negara dalam lingkup bilateral maupun multilateral yang saling terhubung baik secara politik maupun ekonomi, yang oleh John Locke dan Rousseau disebut badan atau organisasi hasil dari perjanjian masyarakat.

#### f. Good Governance

*Good Governance* jika diterjemahkan secara sederhana adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam Taskap ini penulis mengacu pada definisi yang dibuat oleh World Bank yaitu suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.



---

<sup>9</sup> Nibras Nada Nailufar, "Pengertian Negara Menurut Para Ahli" (<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/27/150000469/pengertian-negara-menurut-para-ahli?page=all>, Diakses pada 24 Juni 2020, 22:04)



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **5. Umum**

Sebelum membahas konteks teoritis pemikiran dalam TASKAP ini, sangat penting terlebih dahulu memahami ideologi negara, perekonomian, dan situasi negara, termasuk kondisi Sri Lanka pasca perang yang sangat mempengaruhi kebijakan fiskal dan anggaran militer. Karena hubungan internasionalnya dengan sejumlah negara Sri Lanka sering kali terseret bila terjadi konflik di tingkat global, regional maupun nasional yang akan berdampak pada sistem pertahanan negara.

Selain itu, komitmen negara yang tidak hanya mendukung organisasi militer tetapi juga memenuhi semua kebutuhan pertahanan tidak terlepas konteks demokrasi dan politik negara Sri Lanka yang turunannya meliputi prioritas pembangunan nasional Sri Lanka dan peraturan perundang-undangan. Selain itu lingkungan strategis global dan regional juga sangat mempengaruhi situasi dalam negeri srilanka, termasuk dalam membuat kebijakan fiskal untuk mendukung organisasi militer negara tersebut.

#### **6. Peraturan Perundang-undangan**

Sri Lanka (Ceylon) adalah negara yang dikenal sebagai negara pulau. Sri Lanka adalah negara yang menjamin hak-hak dasar rakyat yang diakui dan dihormati secara konstitusi. Konstitusi adalah hukum tertinggi di republik sosialis demokratis Sri Lanka dan merupakan panduan untuk mencapai tujuan-tujuan demokratis sebagai negara kesatuan.

Di Republik Sri Lanka, kedaulatan ada di tangan rakyat dan tidak dapat dicabut. Kedaulatan mencakup kekuasaan pemerintah, hak-hak dasar dan waralaba. Yang mana kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh Parlemen, yang terdiri dari wakil-wakil Rakyat yang dipilih dan oleh rakyat pada referendum. kekuasaan eksekutif, termasuk pertahanan Sri Lanka, akan dilaksanakan oleh presiden. Dan kekuasaan yudisial dilaksanakan oleh parlemen melalui pengadilan, pengadilan dan lembaga yang dibentuk dan didirikan, atau diakui, oleh Konstitusi,

atau diciptakan dan ditetapkan oleh hukum, kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak istimewa, kekebalan dan kekuasaan parlemen.<sup>10</sup>

## 7. Kerangka Teoritis

Dalam pembahasan Taskap ini, penulis melandaskan kepada beberapa teori sebagai berikut:

### a. Teori Good Governance

Konsep Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik mengemuka sekitar era 90-an awal, yang diprakasai oleh Bang Dunia (World Bank), menyusul terjadinya krisis beberapa negara di Afrika yang dituangkan dalam sebuah laporan yang berjudul "The African development crisis to a crisis of governance". Istilah governance dan good governance dipublikasikan secara resmi pada tahun 1992 oleh Bank Dunia dengan judul: Governance and Development. Sejak saat itu konsep good governance diterapkan oleh lembaga-lembaga donor dalam memberikan bantuan pinjaman modal keuangan dan pembangunan kepada negara-negara yang sedang membutuhkan.

Menurut Dwi Payana good governance adalah: "Sebagai "kepemerintahan yang baik". Adapula yang mengartikannya sebagai "tata pemerintahan yang baik" dan ada pula yang mengartikannya sebagai "sistem pemerintahan yang baik". Selanjutnya dijelaskan pula bahwa istilah "governance" sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan publik good and services. Sedangkan arti "good" dalam "goodgovernance" mengandung dua pengertian, pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan, berkelanjutan dan keadilan sosial; kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Praktek terbaiknya di sebut "good governance" atau kepemerintahan yang baik. Sehingga dengan demikian "good governance" didefinisikan sebagai "penyelenggaraan pemerintah yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif

<sup>10</sup> Konstitusi Republik Sosialis Demokratis Sri Lanka edisi Revisi tahun 2015

dan efisien dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara domain-domain Negara, sektor swasta dan masyarakat".

Pada implementasinya, good governance dioperasionalkan melalui prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, konsensus, kesetaraan dan keadilan, efektifitas dan efisien, akuntabilitas, Visi Strategi <sup>11</sup> yang mewakili elemen-elemen tertentu dari tata kelola yang baik. Yang terakhir mengacu pada cara-cara yang berbeda di mana prinsip-prinsip tersebut diwujudkan sebagai cara-cara berbeda dari perundang-undangan dan interpretasi peradilan. Prinsip-prinsip good governance biasanya ditetapkan dalam dokumen kebijakan, yang umumnya tidak mengikat, tetapi dapat memiliki efek mengikat ketika dokumen tersebut memiliki karakter formal yang cukup. Namun, dokumen kebijakan yang tidak memiliki efek hukum langsung mungkin sampai batas tertentu mengikat melalui prinsip-prinsip administrasi yang tepat.

#### **b. Teori Ofensif-Defensif**

Teori Offense-Defense yang dirumuskan oleh Stephen Van Evera. Teori ini juga berangkat dari konsep security dilemma milik Robert Jervis. Jervis menjelaskan bahwa security dilemma dapat didefinisikan sebagai suatu fenomena aksi dan reaksi antara beberapa negara di mana tindakan suatu negara untuk meningkatkan keamanannya akan berakibat atau dianggap melemahkan keamanan negara lainnya. Prediksi dasar mengenai keseimbangan offense-defense adalah apabila offense mendominasi maka security dilemma akan meningkat, lalu diikuti oleh perlombaan senjata, dan pada akhirnya perang kemungkinan besar akan terjadi. Oleh karena itu, perang dapat dicegah apabila defense dapat mengungguli dominansi offense.

Teori offense-defense menawarkan sebuah pandangan baru dalam politik internasional yang didasari pada argumen bahwa, perang dapat dicegah ketika defense mendapatkan keuntungan atas offense dalam skema offense-defense balance (Glaser & Kauffman, 1998). Van Evera (1998, hal.

---

<sup>11</sup> Dede Rosyada, Dkk, "Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani", UIN Syarif Hidayatullah, 2000, hal 182

5-6) berargumen bahwa perang akan terjadi apabila conquest mudah dilakukan, dan terjadi pergeseran keseimbangan dalam offense-defense yang dapat memperbesar risiko pecahnya perang. Van Evera juga menjelaskan setidaknya ada sepuluh penyebab perang jika offense mendominasi keseimbangan di sebuah kawasan.

- 1) Apabila negara-negara mudah untuk dikuasai, situasi ini akan membuka kesempatan untuk melakukan ekspansi, bahkan bagi negara dengan kekuatan menengah sekalipun;
- 2) Self-defense sulit, sehingga negara menjadi semakin insecure. Situasi ini mendorong mereka untuk memperkuat diri dengan cara defensif;
- 3) Rasa insecure negara juga mendorong mereka untuk menolak ekspansi negara lain dengan cara yang lebih keras. Peningkatan kekuatan oleh negara lain dapat mengancam keamanan nasional negara sendiri, sehingga bukan tidak mungkin expansionism dapat melahirkan respon yang lebih keras;
- 4) Kesempatan bagi negara sebagai penyerang pertama terbuka, menambah resiko terjadinya preemptive war;
- 5) Jendela kesempatan dan kerentanan lebih besar, meningkatkan bahaya perang preventif;
- 6) Negara-negara lebih sering mengadopsi taktik diplomasi fait accompli, dan taktik seperti lebih sering memicu perang;
- 7) Negaranegara tidak kooperatif, sehingga negosiasi sering gagal dan perselisihan/sengketa sulit diakhiri;
- 8) Negara-negara menaruh kebijakan luar negeri dan pertahanan dalam kerahasiaan yang ketat, meningkatkan risiko salah perhitungan dan diplomatic blunder;
- 9) Perlombaan persenjataan terjadi begitu cepat sehingga lebih sulit untuk dikontrol, meningkatkan risiko perang preventif dan perang false optimism;
- 10) Offense dominance is self-feeding, bila conquest semakin mudah, maka negara akan mengadopsi kebijakan-kebijakan yang lebih

mempermudah (sebagai contoh, kebijakan militer yang lebih offensif) mereka untuk melakukan conquest.<sup>12</sup>

## 8. Lingkungan Strategis

### a. Lingkungan Global

Sebagaimana negara-negara lainnya di dunia, apa pun yang terjadi di tingkat global dengan cepat juga akan mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara di Sri Lanka. Apalagi posisinya yang sangat strategis dan cukup tidak terlalu jauh dengan kawasan Timur Tengah yang sejak lama tak berhenti bergolak, apalagi dengan dominasi Amerika Serikat di kawasan tersebut. Sejak perang teluk, hingga ketegangan terbaru antara Amerika Serikat dan Iran di awal tahun kemarin, kemudian perang dingin Amerika Serikat dengan China, konflik China dengan India di perbatasan, plus pandemi Covid-19 yang melanda dunia, tentu tak akan terelakan oleh Sri Lanka dampaknya. Dimana peristiwa-peristiwa besar tersebut telah berkontribusi pada melambatnya perekonomian dunia. *International Monetary Fund* (IMF) bahkan memprediksi output ekonomi dunia tahun ini akan menyusut hampir 5%, atau hampir 2% lebih buruk dari perkiraan yang dirilis pada bulan April 2020<sup>13</sup>. Tentu saja jika ekonomi dunia mengalami perlambatan, Sri Lanka yang ekonominya sangat bergantung pada perekonomian global, tentu saja akan mengalami kontraksi. Sementara pertikaian Amerika Serikat dan China juga melahirkan polarisasi serta blok-blok negara yang mendukung salah satu dari kedua negara yang tengah bertikai tersebut. Tak hanya dampak ekonomi, suhu politik global tersebut juga akan berpengaruh pada situasi nasional Sri Lanka. Dimana China adalah salah satu negara yang cukup akrab dengan Sri Lanka, terutama sejak pembangunan Pelabuhan Internasional Hambantota Sri Lanka.

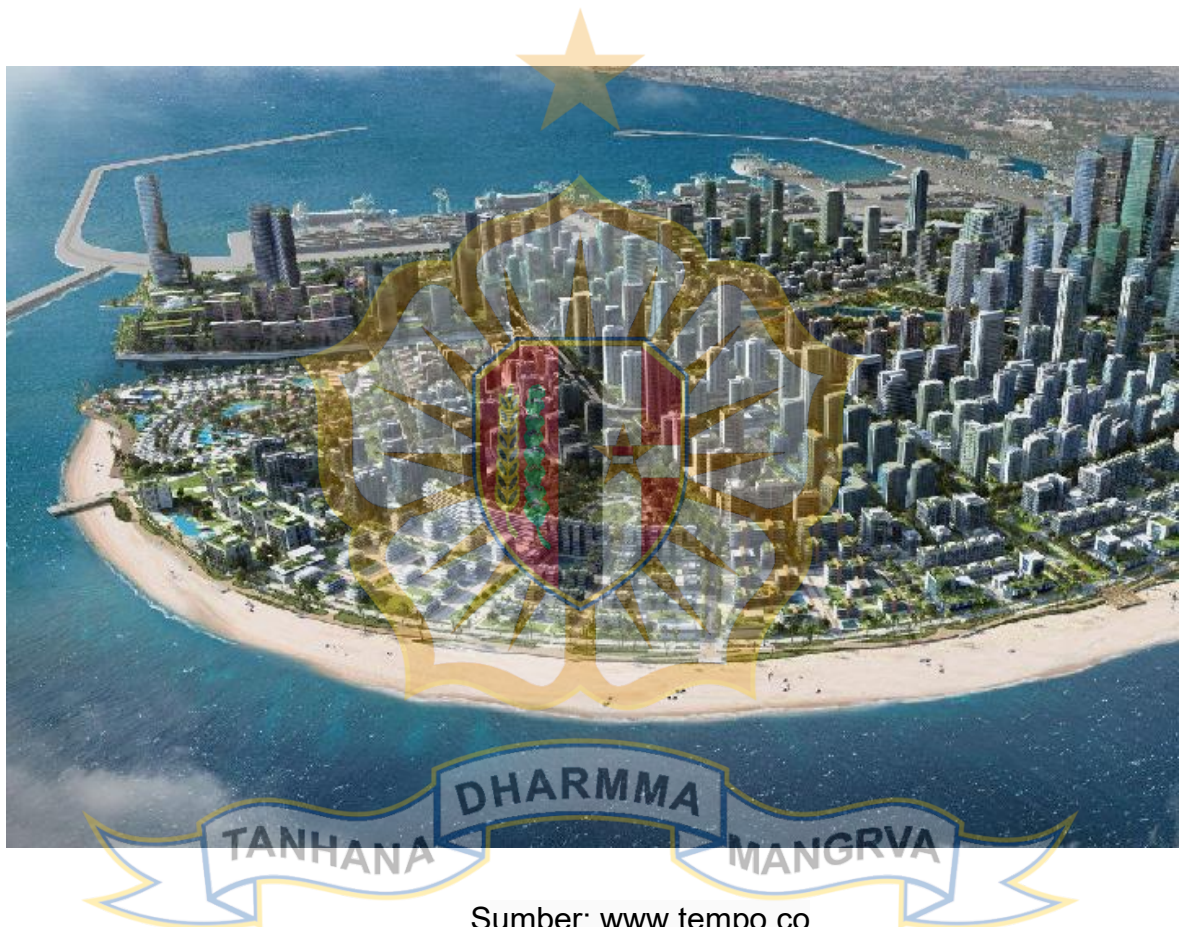
<sup>12</sup> Fadhil Alghifari dan Raja Nathania Olga Letticia, "Analisis Teori Offense-Defense Terhadap Reformasi Kebijakan Pertahanan Jepang Dalam Dinamika Keamanan Di Asia Timur", Jurnal Politik Internasional, 2016, hal. 20.

<sup>13</sup> BBC, "Krisis Ekonomi Akibat Covid-19: IMF Perkiraan Luka Ekonomi Karena Krisis Global Akibat Pandemi Virus Corona Lebih Buruk Dari Perkiraan" (<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53168814>, diakses pada 22 Juli 2020, pukul 11:50)



Pembangunan pelabuhan yang terletak di sepanjang pantai Selatan pulau Samudra Hindia itu memakan dana senilai US\$ 1,5 miliar atau sekitar Rp 21 triliun (estimasi kurs Rp 14.000/dolar). Sebanyak US\$ 1,1 miliar dana itu berasal dari utang yang diberikan China. Proyek tersebut diresmikan oleh Presiden Mahinda Rajapaksa, yang menjabat dari 2005 hingga 2015.

Gambar: 1 Pelabuhan Sri Lanka senilai Rp 20,16 triliun yang didanai China



Sumber: [www.tempo.co](http://www.tempo.co)

Kini Sri Lanka harus membayar utang itu kepada China karena pendapatan devisa Sri Lanka dari ekspor ternyata tidak cukup untuk memenuhi kewajiban utang internasionalnya, dan pada tahun 2017 China mengambil alih pelabuhan.<sup>14</sup> Negara China memang sedang aktif mendanai

<sup>14</sup> Rehia Sebayang, "Demi Pelabuhan, Sri Lanka Terjerat Utang Besar ke China, CNBC Indonesia", (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20191102063550-4-112143/demi-pelabuhan-sri-lanka-terjerat-utang-besar-ke-china>, diakses pada 22 Juni 2020, 21:18)

proyek-proyek ekonomi di berbagai negara seperti Pakistan, Myanmar, Nepal termasuk Sri Lanka. Namun belakangan ini hubungannya kurang baik dengan Amerika Serikat. Jeffrey Sachs mengungkapkan sedang terjadi perang dingin antara AS dan Tiongkok, sejak Huawei mengambil alih pasar global dengan terobosan 5G.<sup>15</sup> Bagi AS hal itu adalah ancaman global karenanya ia memutuskan hubungan dengan Huawei. Ketidakharmonisan kedua negara tersebut menimbulkan kekhawatiran pada Sri Lanka dalam aspek ekonomi.

## b. Lingkungan Regional

Letak geografis negara Sri Lanka yang berada dalam kawasan Asia Selatan tentu membuat negara itu tak dapat melepaskan dirinya dari kondisi politik dan ekonomi regional. Salah satu lembaga besar di kawasan ini adalah *South Asian Association for Regional Cooperation* (SAARC), yang didirikan pada tahun 1985. Sri Lanka menjadi bagian dari organisasi ini bersama negara India, Bangladesh, Pakistan, Bhutan, Maladewa, Nepal, dan Afghanistan. Sebagian besar negara-negara di kawasan Asia Selatan tersebut masih dikategorikan sebagai negara-negara berkembang dengan kondisi perekonomian dan stabilitas keamanan yang lemah.

Beberapa konflik yang masih sering terjadi di kawasan Asia Selatan, baik bersenjata maupun sekadar kontravensi antarnegara. Ketidastabilan politik dan ekonomi domestik di salah satu negara juga bisa mengganggu hubungannya dengan negara anggota SAARC yang lain. Faktor-faktor yang menghambat peningkatan kerjasama di Asia Selatan diantaranya etnis. Di Asia Selatan terdapat kelompok etnis di suatu negara yang memiliki hubungan dengan kelompok etnis yang sama di negara lain. Kondisi ini menyebabkan terjadinya polarisasi etnis yang kemudian menjadi konflik. Seperti yang terjadi pada Militansi Tamil dan kekerasan etnis Sinhalese di Sri Lanka, aktivitas terorisme di Kashmir, gerakan anti-Muhajir di Karachi, atau

<sup>15</sup> Athika Rahma, "Perang Dingin AS-China Lebih Mengerikan dari Corona?", (<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4285555/perang-dingin-as-china-lebih-mengerikan-dari-corona>, Diakses pada 22 Juni 2020, 21:47)

kekerasan komunal di India terkait isu agama yang juga menimbulkan reaksi hingga ke Pakistan dan Bangladesh, yang memberikan efek buruk terhadap hubungan antarnegara di Asia Selatan.<sup>16</sup>

Sri Lanka sudah lama jadi sasaran kekerasan ekstremis. Pengeboman berencana pada hari Minggu Paskah, yang menewaskan hampir 300 orang dan melukai ratusan lainnya, merupakan yang terbaru dalam sejarah panjang tragedi yang berkaitan dengan agama dan etnis di Sri Lanka. Sesudah pengeboman, polisi menahan 24 orang dan tiga polisi terbunuh dalam penyeragaman ini.

Pemerintah Sri Lanka mengkambinghitamkan Jamaah Tauhid Nasional (NTJ), kelompok Islam radikal yang dikenal suka merusak patung-patung Buddha, sebagai otak di balik serangan di hari Minggu Paskah tersebut. Namun kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) telah mengklaim sebagai pihak yang bertanggung jawab atas ledakan bom yang terjadi.<sup>17</sup>

### c. Lingkungan Nasional

Sri Lanka, sebuah negara kepulauan tropis dan subur di Asia Selatan yang terdiri dari beragam kelompok etnis dan agama. Sayangnya, keragaman penduduk itu menjadi bara dalam sekam. Sri Lanka menyimpan rentetan konflik etnis dan agama yang panjang dan masih berlangsung hingga detik ini.<sup>18</sup>

Setelah pengeboman gereja di Sri Lanka yang menewaskan 250 orang, kebencian terhadap umat Muslim semakin meningkat. Pemerintah bahkan memberlakukan larangan hijab 'yang menghalangi identifikasi dan mengancam keamanan nasional', yang semakin memicu penindasan dan kebencian terhadap wanita Muslim. Islamofobia bukan hal baru di Sri Lanka. Sebagian bermula dari perang saudara yang panjang melawan Macan Tamil.

<sup>16</sup> Devi Ratri Mahanani, Skripsi : "Stagnasi South Asian Association For Regional Cooperation (Saarc) Dalam Mengupayakan Kerjasama Di Asia Selatan" (Surakarta: UNS, 2018), hal.3

<sup>17</sup> Damien Kingsbury, "Sejarah Kekerasan di Sri Lanka, Hubungannya dengan Aksi Pengeboman dan ISIS, National Geographic Indonesia" (<https://nationalgeographic.grid.id/read/131710402/sejarah-kekerasan-di-sri-lanka-hubungannya-dengan-aksi-pengeboman-dan-isis?page=all>, Diakses pada 24 Juli 2020, 21:46)

<sup>18</sup> Tony Firman, "Sri Lanka yang Terus Koyak karena Konflik SARA" (<https://tirto.id/sri-lanka-yang-terus-koyak-karena-konflik-sara-dm8n>, Diakses pada 25 Juli 2020, 21:30)



Sebagian besar Muslim Sri Lanka dari etnis Tamil dan menghadapi diskriminasi agama dan etnis—diskriminasi agama dari sesama warga Tamil (yang sebagian besar Hindu), dan diskriminasi etnis dari Sinhala yang sebagian besar beragama Buddha. Hal ini terutama karena kelompok tersebut dianggap mereka selalu berusaha untuk memisahkan diri dari tradisi dan budaya yang berlaku dan mengidentifikasi diri dengan identitas yang berbeda.

Ketika perang berakhir pada tahun 2009 dan nasionalisme Buddhis sedang meningkat, para **ekstremis** secara aktif mulai mendorong propaganda anti-Muslim, hingga berkolusi dengan pemerintah. Kerusuhan terjadi pasca-serangan, sebuah masjid dihancurkan, toko-toko dan rumah-rumah Muslim dibakar, dan seorang pria Muslim secara brutal dipukuli oleh sekelompok orang, yang menyebabkan diberlakukannya jam malam di seluruh negeri. Bahkan penindasan terhadap wanita menjadi sangat intens.<sup>19</sup>

## 9. Data dan Fakta

Sebagai tambahan penulis merasa perlu mengemukakan beberapa hasil penelitian dan karya ilmiah yang terkait kebijakan anggaran dan fiskal yang terkait organisasi militer Sri Lanka. Hasil kajian dalam bentuk jurnal atau artikel yang dipublikasikan oleh para peneliti terdahulu dan kami anggap relevan dengan topik dan ruang lingkup penulisan TASKAP ini adalah berikut:

### a. Sri Lanka's post-war defence budget: A systematic review, *Daily Mirror*

Tinjauan sistematis anggaran pertahanan pasca perang mengungkapkan bahwa Sri Lanka membelanjakan terlalu banyak untuk pertahanan dan anggaran pertahanan dihabiskan secara tidak efisien.

Penelitian yang dilakukan oleh Daniel Alphonsus, yang telah menjabat sebagai penasihat menteri keuangan Sri Lanka dengan pengalaman bekerja di Kementerian Luar Negeri dan Verité Research, bertujuan untuk menunjukkan celah dalam struktur ekonomi pertahanan yang ada dan bagaimana hal itu dapat ditingkatkan. Dari perspektif keuangan publik, untuk

<sup>19</sup> Chandni Doulatramani, "Pelarangan Hijab di Sri Lanka Picu Kebencian terhadap Wanita Muslim", (<https://www.matamatapolitik.com/analisis-hijab-direnggut-pelecehan-wanita-muslim-sri-lanka-picu-kebencian/>), Diakses pada 25 Juli 2020, 21:31)

pertahanan adalah 12 persen dari pengeluaran Pemerintah Sri Lanka (GOSL) sedangkan angkatan bersenjata, keamanan sipil dan polisi adalah 40 persen dari GOSL tagihan upah.

Menurut penelitian, anggaran pertahanan rata-rata US \$ 421 juta yang dialokasikan selama 1983-1987 telah meningkat menjadi US \$ 1499 juta selama 2006-2009. Anggaran rata-rata pascaperang diperkirakan US \$ 1.716 juta. Ini menunjukkan bahwa pengeluaran pertahanan lebih tinggi dan terus meningkat. Menurut data Bank Dunia, anggaran pertahanan Sri Lanka adalah 11 persen dari pengeluaran Pemerintah Pusat sementara di negara lain hanya sebesar 5,79 persen dengan populasi yang sama. Data tersebut juga membuktikan bagaimana Sri Lanka menghabiskan jumlah uang yang kira-kira dengan negara Myanmar, yang memiliki populasi 50 juta dan Filipina, yang memiliki populasi sekitar 100 juta. Rata-rata negara di dunia hanya 40 persen menghabiskan anggaran pertahanan untuk tenaga kerja, sementara di Sri Lanka 70 persen.

Menurut Jane's Review Pertahanan, Sri Lanka relatif memiliki kemampuan tinggi dalam artileri, baju besi dan infanteri dalam domain darat dan logistik dalam domain maritim. Namun, ini mencerminkan kebutuhan keamanan masa perang daripada kebutuhan keamanan pasca-perang. Namun, ada kesinambungan yang luas dalam anggaran pertahanan. Menurutnya anggaran militer yang tinggi sebaiknya dialokasikan untuk melunasi hutang, sehingga Sri Lanka memiliki stabilitas ekonomi makro yang lebih besar.<sup>20</sup>

#### **b. Unprecedented military budget in Sri Lanka**

Analisa yang dilakukan oleh Saman Gunadasa yang berjudul Unprecedented military budget in Sri Lanka, mengatakan RUU Apropriasi pemerintah Sri Lanka terkait pengeluaran anggaran tahun 2013 telah mengalokasikan 290 miliar rupee (US \$ 2,2 miliar) yang digunakan untuk gabungan kementerian pertahanan dan pembangunan perkotaan.

<sup>20</sup> Kamanthi Wickramasinghe, "Sri Lanka's post-war defence budget: A systematic review, *Daily Mirror*", (<http://www.dailymirror.lk/features/Sri-Lankas-post-war-defence-budget-A-systematic-review/185-182511>, Diakses pada 25 Juli 2020, 20:26)

Ini adalah peningkatan 26 persen dari 2012 dan mewakili pengeluaran militer tertinggi di negara itu, bahkan lebih besar daripada selama perang komunal yang berkepanjangan melawan separatis Macan Pembebasan Tamil Eelam (LTTE) yang berakhir pada Mei 2009.

Peningkatan yang terus-menerus dalam pengeluaran pertahanan adalah untuk semakin memperkuat militer dan kekuatan-kekuatan represif lainnya dari negara di tengah meningkatnya pertentangan di antara para pekerja, kaum miskin pedesaan dan kaum muda terhadap program penghematan pemerintah.<sup>21</sup>

### c. Sri Lanka Military Spending/Defense Budget 1960-2020

Data pengeluaran militer dari SIPRI berasal dari definisi NATO, yang mencakup semua pengeluaran saat ini dan modal untuk angkatan bersenjata, termasuk pasukan penjaga perdamaian; kementerian pertahanan dan lembaga pemerintah lainnya yang terlibat dalam proyek pertahanan; pasukan paramiliter, jika ini dinilai dilatih dan dilengkapi untuk operasi militer; dan aktivitas luar angkasa militer. Pengeluaran semacam itu termasuk personel militer dan sipil, termasuk pensiun pensiun dari personel militer dan layanan sosial untuk personel; operasi dan pemeliharaan; pembelian; penelitian dan pengembangan militer; dan bantuan militer (dalam pengeluaran militer negara donor).

- 1) Anggaran belanja / pertahanan militer Sri Lanka untuk tahun 2018 adalah \$ 1,68 miliar, penurunan 9,92% dari 2017.
- 2) Anggaran belanja / pertahanan militer Sri Lanka untuk 2017 adalah \$ 1,87 miliar, naik 7,18% dari 2016.
- 3) Anggaran belanja / pertahanan militer Sri Lanka untuk 2016 adalah \$ 1,74 miliar, penurunan 15,38% dari 2015.
- 4) Anggaran belanja / pertahanan militer Sri Lanka untuk tahun 2015 adalah \$ 2,06 miliar, meningkat 7,48% dari tahun 2014.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Saman Gunadasa, "Unprecedented military budget in Sri Lanka", (<https://www.wsws.org/en/articles/2012/10/slec-o19.html>, 25 Juli 2020, 21:26)

<sup>22</sup> Word bank, "Sri Lanka Military Spending/Defense Budget 1960-2020", (<https://www.macrotrends.net/countries/LKA/sri-lanka/military-spending-defense-budget>, Diakses pada 25 Juli 2020, 21:24)

### BAB III

## PEMBAHASAN

#### 10. Umum

Saat ini Negara Sri Lanka telah mempunyai kekuatan militer yaitu sebanyak 346.700 anggota personel aktif yang siap menjaga keamanan dan pertahanan Negara yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Berbicara mengenai mengenai organisasi militer, tidak luput dari pembahasan tentang anggaran militer. Anggaran militer tak hanya mencerminkan kekuatan suatu negara dalam menghadapi kemungkinan ancaman dari dalam dan luar negeri seperti agresi dan sparatisme, tetapi juga menggambarkan keuatan sebuah negara.

Organisasi militer tentu tidak berdiri sendiri dalam system pemerintahan. Sumber pembiayaan organisasi militer adalah dari pendapatan negara yang sudah dialokasikan khusus. Anggaran untuk organisasi pun sudah ditentukan melalui kebijakan fiskal dalam menakar ukuran atau skala prioritas jumlah anggaran yang harus alokasikan untuk mendukung organisasi militer.

Untuk itu dalam pembahasan bab ini, tidak hanya difokuskan pada pembahasan tentang anggaran organisasi militer Sri Lanka, tetapi lebih ditekankan pada beberapa aspek diantaranya; Bagaimana kebijakan anggaran dan fiskal Negara Sri Lanka untuk mendukung organisasi militer ditinjau dari prinsip-prinsip good governance, Seberapa besar pengaruh politik terhadap kebijakan anggaran organisasi militer Sri Lanka, dan apa urgensinya kebijakan anggaran dan fiskal untuk mendukung organisasi militer Negara Sri Lanka.

## **11. Pembentukan Angkatan Bersenjata Sri Lanka, Perluasan dan Mengapa Harus Selaras dengan Prinsip-prinsip Tata Pemerintahan yang Baik di Budget dan Kebijakan Fiskal**

Lebih dari 2.000 tahun lalu, akar militer Sri Lanka sudah dimulai sejak kolonial Portugis. Belanda dan Inggris mendirikan milisi lokal untuk mendukung perang mereka melawan Kerajaan setempat, dan menciptakan Resimen Senapan Ceylon selama perang Kandyan.

Tahun 1881 angkatan bersenjata Sri Lanka dimulai, ketika Inggris menciptakan cadangan sukarela yang bernama Relawan Infantri Ringan Ceylon untuk melengkapi garnisun Inggris di Ceylon jika terjadi ancaman eksternal. Tahun 1910, namanya diubah menjadi Angkatan Pertahanan Ceylon (CDF) dan terdiri dari beberapa resimen. CDF dimobilisasi untuk pertahanan rumah dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II ketika unit-unitnya dikerahkan bersama dengan pasukan sekutu di Asia dan Afrika. Pada akhir perang CDF tumbuh dan menjadi brigade independen.

Tahun 1937, terbentuklah pasukan sukarelawan Angkatan Laut Ceylon yang kemudian diberi nama Ceylon Royal Naval Volunteer Reserve (CRNVR), pasukan ini dimobilisasi untuk perang pada tahun 1939 dan dimasukkan ke dalam Angkatan Laut Kerajaan Britania. Lalu disusul pembentukan Dominion Ceylon dengan Inggris yang memberikan kemerdekaan pada tahun 1948. Setelah itu Sri Lanka membentuk militer regular yang dituangkan dalam undang-Undang Angkatan Darat No. 17 tahun 1949 disahkan oleh Parlemen pada tanggal 11 April 1949 dan diformalkan dalam Lembaran Luar Biasa No. 10028 tanggal 10 Oktober 1949.

Sejak awal, Inggris memainkan peran penting dalam membantu pemerintah Ceylon dalam mengembangkan angkatan bersenjatanya. Sehingga pada 9 Desember 1950 Angkatan Laut Kerajaan Ceylon (RCyN) didirikan sebagai yang termuda dari ketiga cabang militer.

Tahun 1971 terjadi pemberontakan JVP yang membuat Angkatan Bersenjata Ceylon dimobilisasi untuk operasi tempur pertama kalinya. Pemberontakan yang terjadi dapat dikendalikan hanya dalam beberapa bulan saja. Sehingga pada tahun



1972 Ceylon menjadi republik dan Angkatan Bersenjata Ceylon menjadi Angkatan Bersenjata Sri Lanka. Pada tahun 2017 Angkatan Bersenjata Sri Lanka mengerahkan hampir 2.000 personel dan peralatan untuk operasi pertolongan, bantuan dan penyelamatan banjir Sri Lanka 2017. Ini adalah penyebaran militer terbesar di masa damai.<sup>23</sup>

Gambar: 2 Tentara Sri Lanka saat melakukan operasi mencari bahan peledak



Sumber Photo: Foto: AP Photo/Gemunu Amarasinghe

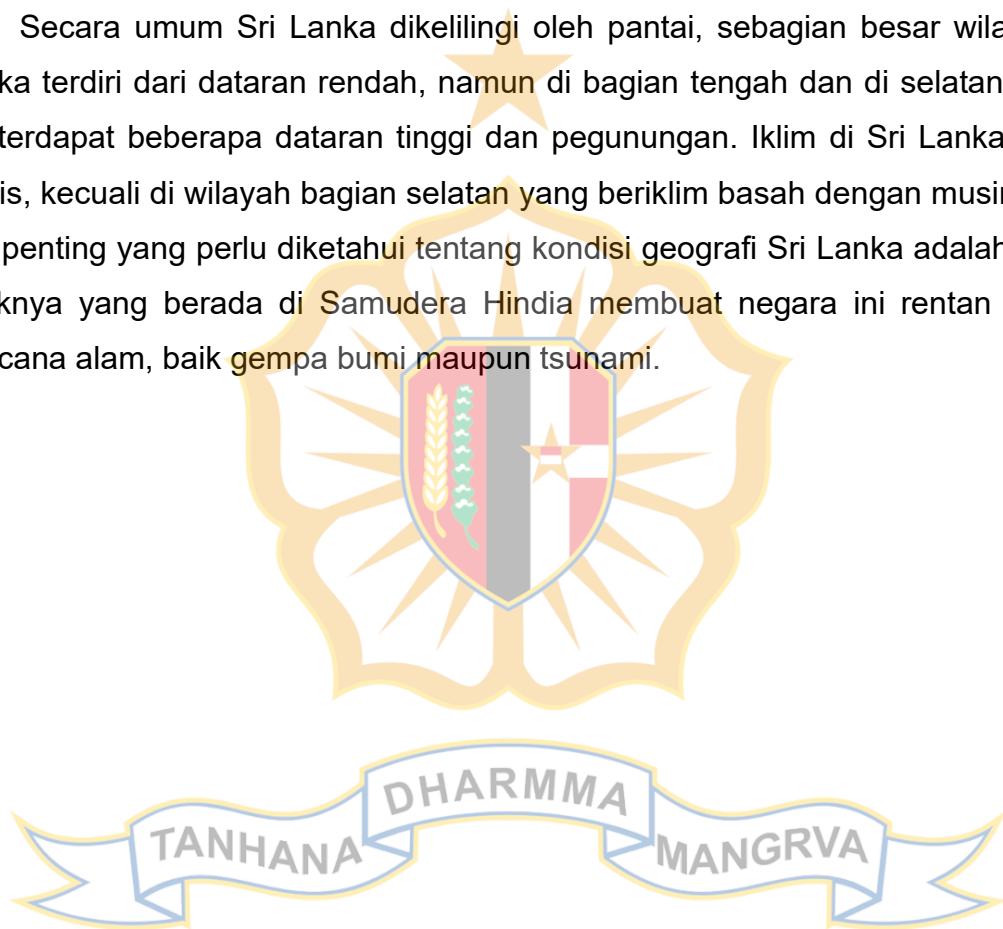
Pada tahun 1994 tentera telah di restrukturisasi menjadi tiga divisi dan empat saruan tugas dengan jumlah personil meningkat dari sebelumnya. Selain peningkatan personil angkatan bersenjata, juga terjadi peningkatan pada infrastruktur militer Sri Lanka. angkatan udara misalnya pada angkatan udara yang memiliki 35 pesawat sayap tetap dan 23 pesawat sayap putar, dimana 23 di antaranya adalah pesawat tempur. Organisasi angkatan udara mengakuisisi tujuh pesawat tempur F-7 China untuk pertahanan udara, empat pesawat serang darat 'Pucara', enam helikopter angkut Mi-17. Demikian pula, angkatan laut membeli 28

<sup>23</sup> Addi M Idhom, "Sri Lanka Minta Bantuan PBB untuk Tangani Dampak Banjir", (<https://tirto.id/sri-lanka-minta-bantuan-pbb-untuk-tangani-dampak-banjir-cpyM>, diakses pada 08 Agustus 2020, 14:02)

aset angkatan laut serta kapal patrol. Akibatnya, militer mampu meningkatkan standar profesionalisme.<sup>24</sup>

Sri Lanka adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Negara ini berada di wilayah Samudera Hindia dan berada di bagian Selatan dari Benua Asia, yang terletak di antara 5° LU - 10° LS dan 79° BT - 82 °BT dengan luas negara 62,702 km<sup>2</sup>. Di wilayah bagian tengah dari negara ini merupakan area pegunungan dengan tinggi lebih dari 2,5 km.

Secara umum Sri Lanka dikelilingi oleh pantai, sebagian besar wilayah Sri Lanka terdiri dari dataran rendah, namun di bagian tengah dan di selatan negara ini, terdapat beberapa dataran tinggi dan pegunungan. Iklim di Sri Lanka adalah tropis, kecuali di wilayah bagian selatan yang beriklim basah dengan musim hujan. Hal penting yang perlu diketahui tentang kondisi geografi Sri Lanka adalah bahwa letaknya yang berada di Samudera Hindia membuat negara ini rentan terkena bencana alam, baik gempa bumi maupun tsunami.

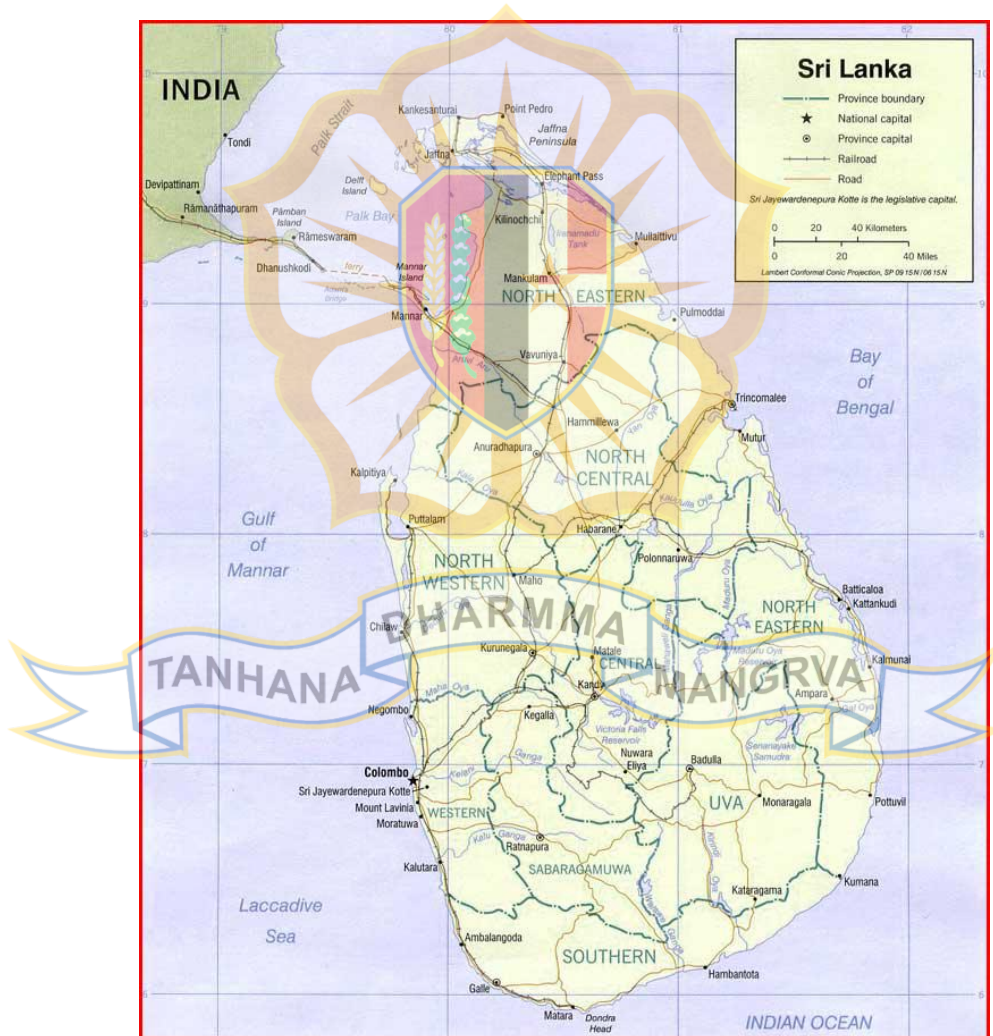


---

<sup>24</sup> Ibid, hal.95



Gambar: 3 Peta Negara Sri Lanka



Sumber : <https://www.sejarah-negara.com/>



Populasi penduduk di Sri Lanka hingga tahun 2015 adalah 20,9 juta jiwa dengan populasi perempuan sebanyak 51% dibanding laki-laki (World Bank Open Data, 2015). Etnis-etnis yang menghuni Sri Lanka diantaranya adalah Sinhala yang merupakan etnis mayoritas, disusul oleh etnis Tamil, dan Arab. Etnis Arab sendiri berasal dari para pedagang Arab yang datang ke Sri Lanka pada abad ke-8 Masehi. Selain ketiga etnis utama tadi, terdapat Burghers yang merupakan komunitas penduduk keturunan Eropa, imigran asal India bagian barat yang disebut Parsis, dan Veddas.

Bahasa utama negara ini merupakan bahasa Sinhala yang kemudian diikuti oleh bahasa Tamil dan Inggris. Sementara berkaitan dengan agama, mayoritas warga negara Sri Lanka merupakan pemeluk agama Buddha dengan angka sekitar 70%, dilanjutkan dengan 13% beragama Hindu, 10% Muslim, dan 7% Kristen.

Atas keindahan dan kekayaan alam serta keberagaman suku agama dan ras, sayangnya negara kecil yang dijuluki negara pulau ini mempunyai sejarah konflik yang cukup panjang, mulai dari pemberontakan, penyerangan hingga peperangan yang masih kerap terjadi hingga saat ini. Organisasi militer telah menjadi jantung atas tumbuh kembangnya negara ini, angkatan bersenjata memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan kedamaian dan ketentraman negara Srilanka.

Pemerintah dan tentara diikat dengan simpul regulasi untuk membangun landasan legal formal yang mengatur tugas dan fungsi tentara dalam sistem bernegara. Penyelenggaraan pertahanan negara sangat bergantung pada besarnya anggaran pertahanan yang dialokasikan oleh pemerintah. Namun pengawasan parlemen terhadap pengeluaran untuk belanja militer sangat lemah oleh pemerintah Sri Lanka. Setidaknya dalam tiga dekade pemberontakan dan era pasca-konflik, sistem pemerintahan demokratis Sri Lanka tidak memiliki mekanisme legislatif yang tepat untuk mengawasi organisasi militer. Tingkat korupsi dan penipuan pemerintah Peoples Alliance (PA) lebih tinggi dari pemerintah sebelumnya; akibatnya, korupsi militer tidak diselidiki. *Bandarage* mencatat, sekitar US \$ 80 juta dan US \$ 120 juta dari alokasi pemerintah US \$

800 juta untuk peralatan militer pada awal 2000 diduga pergi ke politisi dan pejabat militer sebagai suap.<sup>25</sup>

Hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan prinsip good governance, yaitu transparansi. Transparansi adalah keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Kurangnya pengawasan pemerintah terhadap organisasi militer dapat membahayakan keamanan nasional Negara Sri Lanka. Secara historis pemerintah Sri Lanka gagal dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun sejak tahun 2015 pemerintah waktu itu telah berkomitmen dan mulai merekonsiliasi dari berbagai sektor berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Upaya pemerintah dalam mewujudkan good governance telah menjadi agenda utama dengan merancang konstitusi baru hingga akhirnya disetujui tahun 2016-2017 awal dalam bentuk reformasi tata kelola dan supremasi hukum dalam upaya penanganan warisan konflik dan perubahan pada kebijakan ekonomi.

Berkaca dari kejadian diatas maka pada amandemen kesembilan tahun 2015 Sri Lanka telah menetapkan pembentukan komisi untuk menyelidiki tuduhan Suap atau korupsi (CIABOC). Hal tersebut adalah bentuk kebijakan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola yang selama ini kurang baik. Komisi CIABOC di dirikan bertujuan untuk membasmi segala bentuk korupsi diberbagai sector baik pemerintah sipil yang menjalankan roda pemerintahan maupun organisasi militer.

---

<sup>25</sup> Chaminda Athapattu Mudalige P. Wijyaratne, Skripsi : *"Hubungan Sipil-Militer Di Post-Konflik Sri Lanka: Konsolidasian Sipil Yang Berhasil Dalam Wajah Politik"* (Monterey: Naval Postgraduate School, 2015), Hal.66

Secara kontekstual Sri Lanka telah mengimplementasikan konsep good governance dalam roda pemerintahannya. Namun pada prakteknya hal itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Alasan mengapa negara ini belum sepenuhnya menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik sebenarnya akar masalahnya terletak pada sistem dan budaya pemilu.

Sejak kemerdekaan, sistem pemilu yang dianut oleh Sri Lanka adalah system proporsional yang mana para kandidatnya adalah orang-orang yang memiliki kepentingan politik dan memenangkan pemilu dengan berbiaya kampanye yang tinggi. System tersebut menyebabkan terjadinya kekerasan dan pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan pemilu. Hal ini tentu saja berdampak langsung pada supremasi hukum yang merupakan salah satu prinsip dasar tata kelola yang baik.

Kesetaraan dan keadilan pemilu yang bebas dan adil telah ditolak karena kekayaan dan elitisme. Hanya orang-orang kaya yang dapat masuk dalam proses pemilu. Sementara warga negara biasa tidak mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan.<sup>26</sup>

Kampanye pemilihan yang mahal telah menciptakan peluang vital bagi orang-orang terkaya untuk memasuki politik dari pada orang biasa. Karena itu, makna demokrasi pada proses pemilihan belum terealisasi. Aspek praktis demokrasi adalah bagian penting dari mempertahankan pemerintahan yang baik. Proses pemilihan yang baik dapat mencerminkan pemerintahan dan tata kelola yang baik pula. Namun, pengalaman demokrasi pemilu Sri Lanka telah menciderai makna demokrasi, karena kemiskinan dan kurangnya pendidikan masyarakat sipil, para kandidat dapat memanipulasi masyarakat umum dengan menggunakan kekuatan ekonomi mereka. Jadi sebenarnya sistem dan budaya pemilu yang berlaku inilah yang menjadi salah satu hambatan praktis dari praktik tata pemerintahan yang baik di negara Sri Lanka.

Hal tersebut merupakan suatu diskriminasi yang tidak sesuai dengan prinsip salah satu prinsip good governance yaitu kesetaraan. Kesetaraan adalah

---

<sup>26</sup> Shantha Gamlath, "Dilema Adaptasi Prinsip Tata Kelola yang Baik dalam Sistem Pemerintahan di Sri Lanka". *Internasional Ilmu Humaniora & Sosial*. Vol.5 no.8, 2017, hal. 228

kesamaan di dalam sebuah perlakuan dan juga pelayanan, di mana semua warga dan masyarakat memiliki dan mendapatkan kesempatan yang sama.

Kegagalan tata kelola yang baik dalam praktik lembaga pemerintahan dapat mempengaruhi langsung pada sektor perekonomian, apabila perekonomian negara terganggu maka sektor-sektor vital lainnya juga ikut terganggu, seperti pembangunan dan keamanan negara.

Tata pemerintahan yang baik adalah faktor kunci dalam memastikan kemakmuran nasional, karena menciptakan keandalan, kepastian, dan akuntabilitas. Hubungan antara pemerintahan yang baik dan kemakmuran nasional tidak selalu jelas dan pendapat bervariasi di berbagai negara. Tetapi terlihat bahwa tata pemerintahan yang baik penting untuk pembangunan ekonomi dan sosial negara dan tata pemerintahan yang baik juga menciptakan masyarakat yang lebih terbuka dan demokratis.

Pentingnya tata kelola pemerintah yang baik bagi suatu negara bila dilihat pada konsep good governance, pemerintah adalah kelompok orang tertentu, birokrasi administrasi, yang mengendalikan aparatur negara pada waktu tertentu. Artinya, pemerintah adalah sarana yang melaluinya kekuasaan negara digunakan. Negara adalah objek sosial yang tidak material dan nonfisik, sedangkan pemerintah melembagakan kelompok orang dengan kekuatan tertentu. Setiap pemerintahan yang berurutan terdiri dari badan khusus dan istimewa, yang memonopoli pengambilan keputusan politik, dan dipisahkan oleh status dan organisasi dari populasi secara keseluruhan. Fungsi pemerintah adalah untuk menegakkan hukum yang ada, membuat undang-undang baru, dan menengahi konflik.<sup>27</sup>

Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman terhadap prinsip-prinsip di dalamnya. Untuk itu dalam implementasinya negara Sri Lanka harus mematuhi Prinsip-prinsip good governance yang telah menjadi tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik atau buruknya pemerintahan bisa dinilai bila telah memenuhi semua prinsip-prinsip good governance. Mengacu pada World Bank, prinsip-prinsip good governance meliputi:

<sup>27</sup> GH Addink, "Tata Kelola yang Baik: Pentingnya Praktek, Teori dan Definisi". Universitas Halu Oleo. Vol.1 No.1, 2017, hal. 17

### 1) Partisipasi Masyarakat

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

### 2) Tegaknya Supremasi Hukum

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

### 3) Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

### 4) Peduli pada Stakeholder

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

### 5) Berorientasi pada Konsensus

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

### 6) Kesetaraan

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

### 7) Efektifitas dan Efisiensi

Proses-proses pemerintahan dan lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

#### 8) Akuntabilitas

Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

#### 9) Visi Strategis

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.<sup>28</sup>

Setelah mengimplementasikan prinsip-prinsip selanjutnya adalah karakter good governance. Yang harus diperhatikan dalam karakteristik good governance yaitu ; adanya partisipasi masyarakat, adanya aturan hukum yang adil tanpa pandang bulu, pemerintah bersifat transparan, pemerintah mempunyai daya tanggap terhadap berbagai pihak, pemerintah berorientasi pada konsensus untuk mencapai kesepakatan, menerapkan prinsip keadilan, pemerintah bertindak secara efektif dan efisien, segala keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau bersifat akuntabilitas, penyelenggaraan pembangunan bervisi strategis, serta adanya kesalingketerkaitan antar kebijakan.

Berikut adalah asas-asas yang harus diperhatikan oleh pemerintah Srilanka dalam penarapan good goverance

#### 1) Asas Kepastian Hukum

---

<sup>28</sup> Ibid, hal. 5



Asas dalam suatu negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

#### 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Menjadi salah satu landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan negara.

#### 3) Asas Kepentingan Umum

Asas yang bisa mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Maksudnya asas ini menghendaki pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu.

#### 4) Asas Keterbukaan

Asas yang dapat membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

#### 5) Asas Proporsionalitas

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

#### 6) Asas Profesionalitas

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 7) Asas Akuntabilitas

Asas yang dapat menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 8) Asas Efisiensi

Penggunaan pada sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

#### 9) Asas Efektivitas

Dalam pencapaian suatu tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

Dari prinsip-prinsip good governance diatas, jelas dapat membantu negara Sri Lanka dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahannya, agar menciptakan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dan sejalan dengan sistem demokrasi. Tata kelola pemerintah yang baik tadi juga merupakan strategi kontrol untuk menghindari alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran, dan pencegahan segala bentuk korupsi pada penyelenggaraan negara, baik secara politik maupun administratif. Apabila tata kelola pemerintah berjalan dengan baik maka akan berdampak pada kebijakan anggaran dan fiskal dalam mendukung organisasi militer negara Sri Lanka.

## **12. Seberapa Besar Pengaruh Politik, Ekonomi dan Keamanan Terhadap Kebijakan Anggaran Organisasi Militer Sri Lanka**

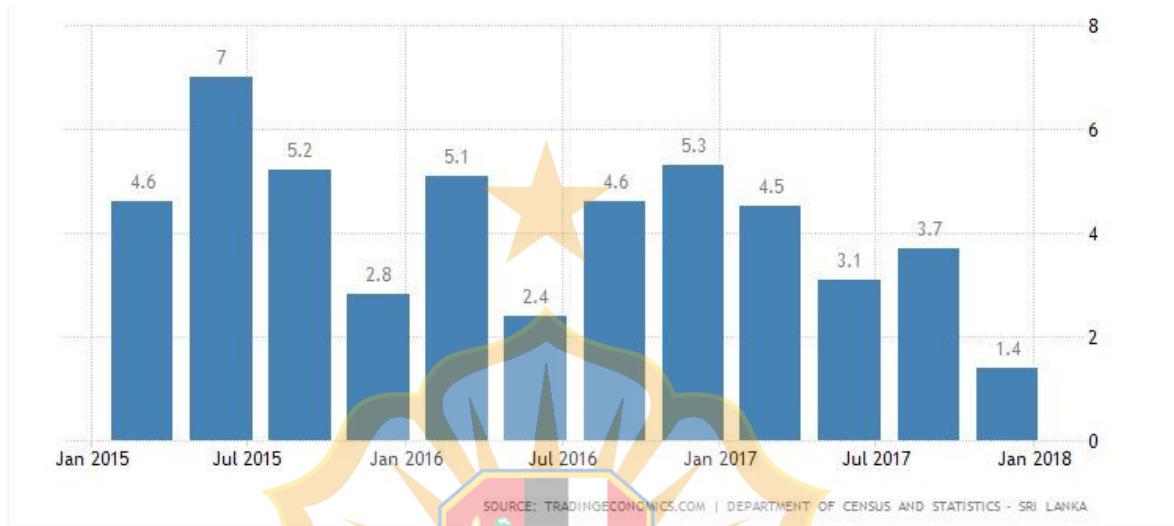
### **a. Pertumbuhan Ekonomi Sri Lanka**

Sri Lanka adalah negara pulau yang kaya akan sumber daya alam. Sektor agraris telah memainkan peran pentingnya bagi perekonomian Sri Lanka selama berabad-abad. Sebelum masa pendudukan Eropa di wilayah ini, padi merupakan komoditas utama Sri Lanka. Kemudian sejak masa penjajahan oleh bangsa Eropa, ekonomi Sri Lanka sebagian besar ditopang oleh sektor perkebunan, terutama kayu manis dan rempah-rempah lainnya. Hal ini disebabkan rempah-rempah merupakan komoditas ekspor yang sangat diperlukan bagi negara-negara di Eropa. Saat kopi yang sempat



menjadi produk andalan di tahun 1830-an terpuruk karena hama, teh pun muncul menggantikan.

Gambar: 4 Pertumbuhan Ekonomi Sri Lanka Tahun 2015-2018



Teh Sri Lanka merupakan teh hitam dengan kualitas sangat baik yang disebut *Ceylon Tea*. Produk ini kebanyakan di ekspor ke Inggris, Rusia, dan kawasan Timur Tengah. Setelah teh, disusul oleh karet yang mulai dikembangkan di akhir abad ke-19. Perkembangan tanaman karet sangat dipengaruhi oleh permintaan industri mobil di wilayah Eropa Barat dan Amerika Utara. Persaingan karet dengan karet sintetis membuat harga karet alam sempat turun. Namun, dengan ikut naiknya harga bahan baku karet sintetis, ada celah peningkatan harga bagi produk karet alam. Selain teh dan karet, komoditas ekspor andalan lainnya adalah kelapa. Sebagian besar produksinya digunakan untuk kebutuhan pasar domestik, mengingat sebagian besar hidangan makanan di Sri Lanka menggunakan bahan olahan kelapa, seperti santan. Produk yang biasanya di ekspor sendiri berupa minyak kelapa dan kopra.

Konflik 3 dekade membuat kontribusi kedua sektor ini turun dari 30% pada tahun 1970 ke angka 21% di tahun 2000 untuk pertanian dan 11.5 % di tahun 1970 menjadi 5% di tahun 2000 untuk perkebunan. Meskipun begitu, pertanian dan perkebunan masih menjadi sektor penting di awal tahun 2000-

an. Namun semakin mendekati fase akhir konflik, sektor pertanian dan perkebunan semakin memburuk karena perusakan dan pembakaran lahan pertanian dan perkebunan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik sebagai bentuk serangan maupun balas dendam.<sup>29</sup>

Selain sektor pertanian dan perkebunan, sektor pertambangan juga menjadi sektor ekonomi yang ada di Sri Lanka. Pertambangan yang paling unggul adalah permata. Industri permata sendiri sudah ada sejak zaman penjajahan Portugis. Awalnya, ketika muncul di sekitaran tahun 1942, industri permata belum dikelola secara serius oleh pemerintah sehingga pengaruhnya terhadap ekonomi Sri Lanka masih sangat terbatas. Pemerintahan kolonial pada saat itu tidak tertarik untuk mengembangkan industri tersebut karena dianggap sebagai sektor ekonomi yang tidak stabil jika dibandingkan dengan perdagangan rempah-rempah. Mereka pun lebih suka jika industri ini dipegang oleh sektor swasta. Bahkan, sektor ini sempat dikendalikan oleh Muslim Arab, baik secara langsung maupun membeli dari para penambang yang kebanyakan merupakan etnis Sinhala.

Pada 1972, pemerintah mendirikan *State Gem Corporation (SGC)* yang pada tahun 1993 dirubah menjadi *National Gem and Jewelry Authority (NJGA)* yang mengatur perdagangan permata dan kemudian membantu meningkatkan kontribusinya terhadap ekonomi Sri Lanka meskipun sempat menurun akibat munculnya ekspor permata ilegal serta praktik pemalsuan permata Sri Lanka dengan permata asal Thailand. Sri Lanka sempat menjadi satu dari 5 negara produsen permata terbaik di dunia kala itu.<sup>30</sup>

Sementara sektor ekonomi utama yaitu pariwisata tengah terguncang akibat imbas konflik, pariwisata memegang peranan yang cukup penting sebagai penyumbang devisa bagi negaranya di awal periode pasca konflik. Sektor ini sebenarnya telah mendapat perhatian pada tahun 1966 ketika badan terkait didirikan. Namun ketika belum sempat menunjukkan

---

<sup>29</sup> Endratna Kartika Agustin, Skripsi: *"Strategi Pemerintah Sri Lanka Dalam Pengembangan Pariwisata Sebagai Sumber Ekonomi Baru Pasca Konflik Etnis Tamil Dan Sinhala"* (Yogyakarta: UMY, 2017), Hal. 49.

<sup>30</sup> Ibid, Hal. 50

pencapaian yang signifikan, pariwisata juga mengalami penurunan akibat perang sipil di Sri Lanka. Hal ini menyebabkan pengunjung enggan datang ke Sri Lanka dan lebih memilih Maldives dan Goa di India sebagai penggantinya.

#### **b. Situasi Politik Negara Sri Lanka**

Sistem pemilu yang dianut oleh Sri Lanka adalah system proporsional yang mana para kandidatnya adalah orang-orang kaya yang memiliki kepentingan politik dan memenangkan pemilu dengan biaya kampanye yang tinggi. Kampanye pemilihan yang mahal telah menciptakan peluang vital bagi orang-orang terkaya untuk memasuki politik dari pada orang biasa. Selain itu system pemilu yang tidak sehat telah melahirkan tata kelola pemerintahan yang kurang baik.

Dampak dari system pemilu yang proporsional melahirkan beberapa kebijakan pemerintah dalam mengendalikan dan mengontrol organisasi militer salah satunya dengan menyediakan kuota untuk pemuda miskin pedesaan agar bergabung dalam angkatan bersenjata Sri Lanka, cara itu ditempuh untuk mengurangi angka kemiskinan di negara Sri Lanka dan meringankan kesulitan ekonomi keluarga mereka. Ini secara politis mendukung rezim saat itu karena meningkatkan lapangan kerja, Pada tahun 2000, 5% populasi Sri Lanka, sebagian besar miskin di pedesaan, diperkirakan hidup dengan gaji tentara, 400.000 penduduk miskin perkotaan juga terlibat dalam keamanan dan layanan lain di sektor swasta yang terkait dengan perang ekonomi.<sup>31</sup> Strategi membentuk militer menjadi pekerjaan, dan menyediakan mekanisme bagi pemuda pedesaan yang berpendidikan rendah, hal itu tentu saja merupakan cara pemerintah untuk tetap dapat mempertahankan kontrol militernya. Situasi tersebut menggambarkan bahwa kepemimpinan sipil secara keseluruhan menggunakan institusi militer untuk tujuan politik.

---

<sup>31</sup> Selvarathinam Santhirasegaram, "Militer dan Kemiskinan: Studi Kritis Di Sri Lanka". Studi Negara Berkembang, Volume. 3 No.8, 2013, hal. 91

### c. Situasi Keamanan Negara Sri Lanka

Setelah memperoleh kemerdekaan Sri Lanka justru dihadapkan pada konflik antar etnis di tahun 1983-2009. Perang sipil Sri Lanka yang dikenal dengan perang elam antara pemerintah Sri Lanka dan kelompok separatis Liberation Tigers of Tamil Eelam atau Macan Tamil (selanjutnya disebut LTTE) selama 26 tahun berhasil diakhiri pada tahun 2009. Akhir dari perang sipil terjadi setelah pemerintah Sri Lanka memperoleh kemenangan atas LTTE. Konflik terbuka antara keduanya sebenarnya telah muncul sejak masa pendudukan kolonial Inggris ketika Sri Lanka masih bernama Ceylon. Namun situasi menjadi lebih buruk sejak kelompok militan LTTE melakukan penyerangan terhadap pemerintah Sri Lanka sebagai upaya mereka untuk berpisah dan mendirikan Negara Tamil Merdeka yang dikenal dengan nama Tamil Eelam.

Konflik awalnya terjadi dengan melibatkan dua etnis utama yang mendiami Sri Lanka yaitu Sinhala yang merupakan etnis mayoritas memeluk agama budha dan Tamil yang merupakan etnis minoritas yang memeluk agama Hindu. Kuasa atas pemerintahan secara mutlak dipegang oleh Sinhala. kemunculan kebijakan diskriminatif semakin meningkatkan eskalasi konflik antara dua etnis, terbukti dengan diberlakukannya hukum "Sinhala Only" pada 1956 yang mengganti bahasa resmi Sri Lanka dari bahasa Inggris menjadi bahasa Sinhala. Kebijakan tersebut diikuti dengan dikeluarkannya konstitusi yang mengakui agama Budha sebagai satusatunya agama resmi Sri Lanka.

Kebijakan Sinhala Only yang disahkan oleh Perdana Menteri S.W.R.D Bandaranaike merupakan kebijakan yang menjadi dasar dijadikannya bahasa sinhala sebagai bahasa nasional membuat banyak penduduk Tamil menjadi pengangguran dan jatuh miskin karena tidak menguasai bahasa sinhala dalam bidang pekerjaan.<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Fatrakhul Yusa |, "Peran Diaspora Tamil dalam Konflik Sri Lanka Tahun 2002-2010", Analisis Hubungan Internasional, vol. 3 No. 3, 2014, hal. 106



Adanya diskriminasi ini kemudian menjadi awal mula munculnya gerakan separatis Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) yang dibentuk oleh ekstrimis Tamil. Kelompok ini melakukan penyerangan untuk pertama kalinya di tahun 1983 dan menewaskan 13 tentara Sri Lanka. Peristiwa ini kemudian menimbulkan kerusuhan anti Tamil di ibu kota Kolombo yang menewaskan ratusan orang Tamil dan menjadi awal mula terjadinya perang sipil di Sri Lanka yang dikenal dengan nama perang Elam yang kemudian diikuti dengan perang Elam lainnya.

Sekitar Maret 2018 lalu, kerusuhan antara etnis Sinhale yang beragama Buddha dengan Tamil yang beragama Islam terjadi di Kandy. Kedua kelompok saling melempar serangan dan merusak rumah-rumah ibadah, dan bangunan publik lainnya.<sup>33</sup>

Gambar : 5 Militer Berjaga Di Lokasi Bentrok Antara Umat Buddha dengan Minoritas Muslim Di Distrik Kandy



Sumber Photo: Foto: AP/Chamila Karunarathne

Pada tanggal 21 April 2019, terjadi serangan kembali yang menyasar tiga gereja, empat hotel mewah di kawasan ibu kota Colombo, dan satu insiden di Dematagoda. Serangan yang diklaim oleh kelompok National

<sup>33</sup> Tony Firman, "Kerusuhan Anti-Muslim dan Ancaman Ekstremis Buddhis di Sri Lanka" (<https://tirto.id/kerusuhan-anti-muslim-dan-ancaman-ekstremis-buddhis-di-sri-lanka-cFTZ>, Diakses pada 26 Juli 2020, 22:27)

Thowheeth Jamaath itu membunuh sekitar 279 orang, termasuk sembilan pelaku bom bunuh diri.<sup>34</sup>

Gambar: 6 Gereja Di Utara Kolombo yang Di Bom Saat Misa Paskah



Sumber Photo: Foto: AP/Chamila Karunarathne

Kemanan suatu negara harus didukung dengan pertahanan yang kuat sehingga mampu mencegah gangguan-gangguan dan ancaman yang muncul terhadap keamanan negara. Terlaksananya kemampuan pertahanan dan keamanan suatu negara tentunya membutuhkan daya dukung anggaran. Pada dasarnya Anggaran merupakan bentuk dari kebijakan pemerintah yang tertuang dalam besaran angka dan berlaku untuk jangka waktu tertentu. Tujuan dari anggaran militer sendiri adalah untuk menyediakan pertahanan militer yang kuat bagi suatu negara dan menjaga keamanan bagi para warga negara.

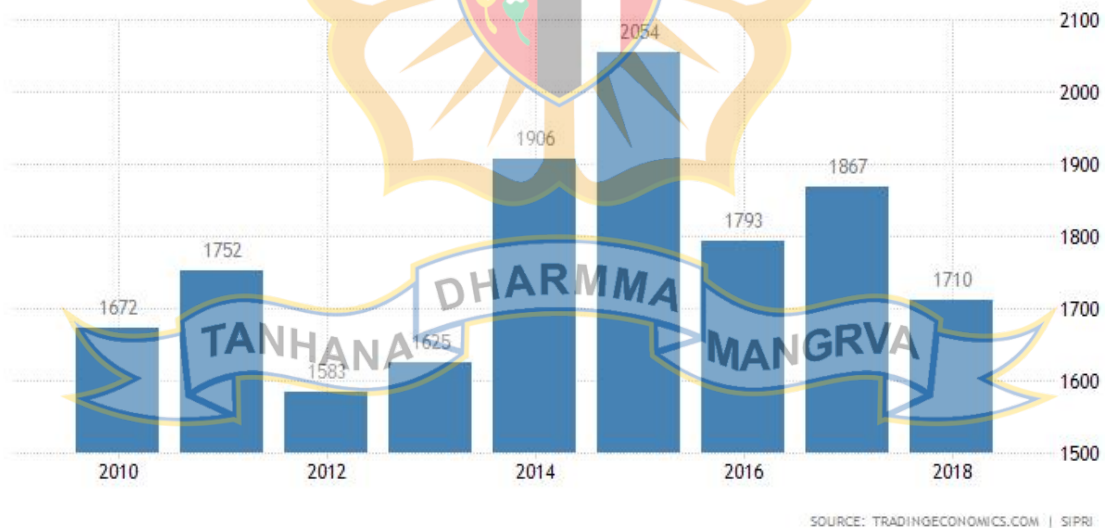
<sup>34</sup> Ardi Priyatno Utomo, "Gereja Katolik Sri Lanka Maafkan Pelaku Bom Minggu Paskah" (<https://www.kompas.com/global/read/2020/04/12/212423670/gereja-katolik-sri-lanka-maafkan-pelaku-bom-minggu-paskah?page=all>, Diakses pada 26 Juli 2020, 20:23)



Selain jumlah tentara, alokasi anggaran pertahanan merupakan elemen yang paling penting sebagai salah satu unsur yang menentukan kapabilitas militer suatu negara. Negara dengan belanja militer lebih besar atau di atas rata-rata normal memiliki indikasi kekuatan militer yang besar. Negara yang memiliki indikasi kekuatan persenjataan yang besar tentunya akan terlihat lebih mengancam dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki alokasi pertahanan yang relatif lebih kecil.

Semakin disadari kini bahwa sangat penting kesiapsiagaan pertahanan suatu negara, baik personel maupun alutsista (alat utama sistem persenjataan) serta dukungan anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas angkatan bersenjata. Berangkat dari itu semua, pada tahun 2018 terjadi penurunan anggaran militer oleh pemerintah Sri Lanka, yang mana pada tahun-tahun sebelumnya cenderung meningkat.

Gambar: 7 Pengeluaran Militer Sri Lanka



Dari diagram diatas dapat dilihat pengeluaran militer Sri Lanka menurun menjadi 1710 USD Juta pada tahun 2018 dari 1867 USD Juta di tahun 2017. Banyak faktor yang memengaruhi anggaran militer Sri Lanka. Bila dilihat dari aspek ekonomi, Negara Sri Lanka memiliki sektor agraris telah memainkan peran pentingnya bagi perekonomian selama berabad-abad. Namun sektor

pertanian dan perkebunan semakin memburuk akibat perusakan dan pembakaran lahan pertanian dan perkebunan yang dilakukan oleh kedua suku yang berkonflik.

Selain itu pariwisata juga memegang peranan yang cukup penting sebagai penyumbang devisa bagi negaranya di awal periode pasca konflik. Namun juga mengalami penurunan akibat perang sipil di Sri Lanka dan hal itu menyebabkan pengunjung enggan datang ke Sri Lanka. Layaknya sebuah siklus, aksi pengeboman itu berdampak serupa bagi pariwisata Sri Lanka dengan kerusakan antar etnis satu tahun sebelumnya. Jumlah kunjungan wisatawan menurun drastis hingga 77% pada Mei 2019.<sup>35</sup> Kepercayaan wisatawan terhadap Sri Lanka yang aman dan nyaman dikunjungi pun akan selalu ada dalam kondisi naik-turun.

Secara global negara Sri Lanka memiliki potensi ekonomi yang luar biasa namun, keamanan negara yang masih labil, membuat perekonomian negara menjadi tidak stabil dan cenderung menurun. Bila dilihat kembali diagram diatas, anggaran militer Sri Lanka selalu berubah setiap tahunnya, tidak pernah konstan. Hal ini menunjukkan kondisi perekonomian negara Sri Lanka setiap tahunnya yang juga naik-turun.

Bila dikaitkan, sistem politik yang melahirkan tata kelola pemerintah yang kurang baik menyebabkan gejolak dalam negeri, kondisi ini adalah akar dari pemberontakan yang berbuntut panjang yang terjadi di negara Sri Lanka. Hal tersebut menyebabkan keamanan negara menjadi terganggu dan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Apabila pertumbuhan ekonomi tidak stabil maka akan berdampak pada pos anggaran Negara Sri Lanka. Pasca konflik dan pemberontakan yang terjadi di Sri Lanka membuat revitalisasi pembangunan menjadi prioritas pemerintah akibat banyaknya bangunan-bangunan yang menjadi korban kerusakan antar etnis yang terjadi terus menerus. sehingga setiap anggaran negara yang tersedia tentu tidak sepenuhnya diperuntukan untuk kebutuhan

---

<sup>35</sup> CNN Indonesia, "Genjot Pariwisata, Sri Lanka Gratiskan Visa untuk 48 Negara", (<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190805174449-269-418581/genjot-pariwisata-sri-lanka-gratiskan-visa-untuk-48-negara>, Diakses pada 08 Agustus 2020, 14:11)

militer tetapi juga akan dialokasikan ke sektor lain terutama untuk bangunan-bangunan vital negara yang rusak akibat terjadinya kerusuhan.

Dapat disimpulkan bahwa, pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, dan sistem politik proporsional, serta keamanan negara yang terganggu adalah tiga hal yang sangat terkait dan mempengaruhi anggaran organisasi militer Sri Lanka. Meski begitu keamanan suatu negara bukanlah sesuatu yang dapat ditawarkan karenanya harus diciptakan solusi supaya anggaran militer dianggarkan sesuai dengan kebutuhan dalam situasi negara Sri Lankas saat ini.

Beberapa peluang untuk tetap dapat mempertahankan anggaran militer yaitu dengan merancang suatu postur pertahanan sedemikian rupa sehingga anggaran rutin tidak terlalu besar karena peningkatannya bersifat tetap. Jika selalu mempertahankan postur anggaran secara konservatif, maka akan mengurangi peluang pengembangan dan pemeliharaan kapasitas pertahanan negara. Untuk itu diperlukan komitmen nasional untuk mengalokasikan sejumlah tertentu sumber daya nasional untuk pertahanan negara, serta perencanaan pertahanan yang obyektif dan rasional baik dari segi besaran maupun alokasinya sehingga militer dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Penentuan alokasi anggaran pertahanan sebaiknya ditentukan oleh beberapa variabel yang perlu diperhatikan, yaitu :

- 1) Kondisi ekonomi nasional dengan memperhitungkan kemampuan keuangan negara. Penyelenggaraan pertahanan negara sangat bergantung pada besarnya anggaran pertahanan yang dialokasikan pemerintah dan prioritas pembangunan. Peningkatan anggaran pertahanan haruslah tidak menyebabkan efisiensi anggaran terganggu sehingga menyebabkan pembengkakan defisit pembiayaan.
- 2) Rasio kebutuhan pertahanan dengan memperhatikan postur kekuatan militer yang ideal, yang dilihat dari kenyataan geografis (luas wilayah), kenyataan demografi (besar jumlah penduduk), kebutuhan ruang untuk hidup (keinginan untuk sejajar secara politis dengan negara lain), dan perlunya kekuatan penangkal, pertimbangan untuk pembangunan kekuatan militer Sri Lanka dari waktu ke waktu.

Pemenuhan anggaran pertahanan pada rasio yang proporsional akan membangun kemampuan pertahanan yang berdaya tangkal sekaligus memberikan efek stabilitas yang mendorong kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional di bidang ekonomi dan kesejahteraan.

3) Besarnya dan tingkat risiko ancaman yang akan dihadapi. Menjaga perbatasan dan pulau-pulau terluar serta membantu pemerintah dalam penanganan dampak bencana alam di sejumlah daerah. Dalam era global fungsi pertahanan negara juga berhadapan dengan penanganan ancaman terorisme, ancaman keamanan lintas negara, terutama kegiatan ilegal di wilayah perairan Indonesia yang menguras kekayaan alam, seperti perompakan, penangkapan ikan secara ilegal, dan gangguan keamanan maritim lainnya.

4) Kekuatan pokok minimal (*minimum essential forces*), yaitu tingkat kekuatan yang mampu menjamin kepentingan strategi pertahanan yang mendesak. Untuk mencapai ini perlu dilakukan berbagai langkah yaitu pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan alutsista (alat utama sistem persenjataan), serta memenuhi kekurangan personel secara kuantitas dan kualitas.

5) Peningkatan keterlibatan Sri Lanka dalam tugas-tugas perdamaian di kawasan dan di dunia. Sebagai bagian dari kepentingan Sri Lanka, misi perdamaian dunia dan pelibatan di kawasan menuntut kesiapan yang prima dari sektor pertahanan negara sangat menonjol.<sup>36</sup>

### 13. Apa Urgensinya Kebijakan Anggaran dan Fiskal Dalam Mendukung Organisasi Militer Negara Sri Lanka

Sebagai negara yang terletak di wilayah strategis, karena itu negara Sri Lanka harus didukung dengan pertahanan yang kuat sehingga mampu mencegah gangguan-gangguan dan ancaman yang muncul terhadap keamanan negara.

Ditingkat global sederet konflik masih ramai terjadi, seperti konflik antara Amerika Serikat dengan Iran yang dimulai sejak 1953 dan kian memanas di tahun

<sup>36</sup> Posma Sariguna Johnson Kennedy, "Tantangan Pertahanan Dan Ekonomi Indonesia Serta Kebijakan Yang Perlu Dilakukan". *Management Journal* Volume. 2 No.1, 2017, hal. 70

2020 dimana Qosem Soleimani, pemimpin pasukan al-Quds Iran, tewas setelah dihantam rudal oleh pesawat nir-awak AS di Bandara Internasional Baghdad.

Ditambah lagi konflik antara AS dengan China yang kian memuncak, yang lahir mulai dari persoalan pandemi virus corona covid-19, perdagangan, laut China Selatan, aksi protes yang terjadi di Hongkong, hingga pelanggaran HAM terhadap masyarakat Uighur dan konflik lainnya. Serta konflik yang menimbulkan perang hingga 2019 masih berlangsung yaitu Pakistan dan India yang berperang memperebutkan Kashmir merupakan wilayah yang terletak di perbatasan India, Pakistan dan China.

Konflik-konflik yang terjadi di tingkat global telah berdampak pada melambatnya perekonomian dunia. Jika ekonomi dunia mengalami perlambatan, Sri Lanka yang ekonominya sangat bergantung pada perekonomian global, tentu saja akan mengalami kontraksi. Tak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga berdampak pada suhu politik yang juga akan berpengaruh pada situasi nasional Sri Lanka. Apalagi China adalah salah satu negara yang cukup akrab dengan Sri Lanka, terutama sejak pembangunan Pelabuhan Internasional Hambantota Sri Lanka. Begitupun Amerika Serikat, ketidakharmonisannya dengan beberapa negara yang juga menimbulkan kekhawatiran tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga keamanan, jika negara-negara yang tengah berkonflik menyatakan perang maka hal tersebut juga merupakan ancaman nyata untuk negara Sri Lanka.

Sri Lanka merupakan salah satu anggota South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC). Beberapa konflik yang masih sering terjadi di kawasan Asia Selatan, baik bersenjata maupun sekadar kontradiksi antarnegara. Ketidakstabilan politik dan ekonomi domestik di salah satu negara juga bisa mengganggu hubungannya dengan negara anggota SAARC yang lain.

Konflik yang sering terjadi di Asia Selatan, yaitu terdapat kelompok etnis di suatu negara yang memiliki hubungan dengan kelompok etnis yang sama di negara lain. Kondisi ini menyebabkan terjadinya polarisasi etnis yang kemudian menjadi konflik. Seperti yang terjadi pada Militansi Tamil dan kekerasan etnis Sinhalese di Sri Lanka, aktivitas terorisme di Kashmir, gerakan anti-Muhajir di Karachi, atau kekerasan komunal di India terkait isu agama yang juga

menimbulkan reaksi hingga ke Pakistan dan Bangladesh, yang memberikan efek buruk terhadap hubungan antarnegara di Asia Selatan. persoalan inilah yang memicu terjadinya konflik ditingkat regional.

Bila dilihat dari sejarahnya Sri Lanka adalah negara yang tidak pernah sepi dari konflik. Sebelum menjadi sebuah negara merdeka, dahulu Sri Lanka merupakan sebuah kerajaan dengan penduduk asli etnis Sinhala. Mereka menggunakan sistem kasta, mengingat pengaruh Budha yang sangat kental yang sebelumnya sudah lebih dulu ada di tanah ini sejak abad ke-6 Masehi. Berdasarkan data yang ada, terdapat asumsi bahwa dahulu etnis yang kini merupakan etnis mayoritas di Sri Lanka, yaitu Tamil dan Sinhala, hidup secara harmonis di awal-awal perkembangannya. Kedamaian dan stabilitas “pulau” ini pertama kali terusik ketika Anuradhapura yang adalah etnis Tamil. Pada kisaran tahun 1200-1500 Masehi kejayaan Sinhala mengalami kemunduran. Ketidakstabilan kekuasaan Sinhala pun menandai berakhirnya kejayaan etnis Sinhala. Ketika era kerajaan ini berakhir, sekitar tahun 1500-1948 era baru yang didominasi Eropa pun muncul.

Pada tahun 1505-1658 Sri Lanka di jajah oleh Bangsa Portugis. Meskipun kedatangan Portugis berawal dari ketertarikannya terhadap rempah-rempah di Sri Lanka, tak dapat di pungkiri bahwa ekspedisi mereka ke Asia membawa misi kolonialisasi dan kristenisasi. Setelah lebih dari 150 tahun berada di Sri Lanka, Portugis menghadapi masa-masa akhir kekuasaannya di wilayah sekitar tahun 1656, Belanda mengusir Portugis dari Sri Lanka dengan bantuan Raja Kandy.

Setelah Portugis meninggalkan Sri Lanka, Belanda diperkirakan masuk ke wilayah Sri Lanka pada tahun 1602, tidak hanya menguasai rempah-rempah dan mengambil alih perdagangan Belanda berhasil menguasai wilayah-wilayah seperti Colombo, kemudian Mannar, Jaffan, Kalpitiya, Tricomalee, Batticaloa dan Kottiyar. Setelah dijajah oleh Belanda, tahun 1796-1948 Sri Lanka dijajah lagi oleh Bangsa Inggris. Inggris pun menempati posisi Belanda dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Inggris muncul sebagai pemimpin di era baru Revolusi Industri, inovasi teknologi, inovasi ekonomi, dan imperialisme nya yang telah tersebar luas.



Inggris dengan cepat melakukan proses reformasi, seperti penghapusan perbudakan. Pengembangan produksi kayu manis, lada, tebu, kapas, dan kopi. Begitu juga dengan peningkatan aktivitas misionaris Kristen dalam mengembangkan dan menyebarkan agamanya. Perubahan awal dibawah kekuasaan Inggris yang dibarengi oleh serangkaian reformasi yang sistematis mulai diberlakukan pada tahun 1833, serta peletakan dasar bagi struktur politik dan ekonomi berikutnya bagi Ceylon.

Ceylon sendiri merupakan sebutan yang diberikan oleh Inggris kepada Sri Lanka kala itu. Selain itu, penyesuaian dan pembagian tugas lembaga eksekutif dan legislatif pun dilakukan. Bahasa Inggris kemudian menjadi bahasa resmi dalam pemerintahan sekaligus bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah. Inggris benar-benar menanamkan paham demokrasi dan kebebasan individu.

Selain paham demokrasi dan kebebasan individu, paham kapitalisme juga menjadi salah satu agenda Inggris dalam mereformasi sistem ekonomi Ceylon. Mereka memperkenalkan perdagangan bebas. Tanah-tanah yang dahulu menjadi hak milik Inggris dijual kembali kepada penduduk lokal dengan harga murah. Tujuannya untuk mendorong sektor pertanian dan perkebunan.

Merasa tidak sepeham dengan Inggris, para biksu kemudian mulai membangkitkan semangat pemberontakan. bertambahnya jumlah kau intelektual yang perlahan kemudian menumbuhkan kesadaran nasionalisme, dan sekita tahun 1880 an munculah Nasionalisme di Sri Lanka sebuah perhimpunan Reformasi Sosial Ceylon yang dimotori oleh pemeluk agama Buddha. Setelah melewati perang dunia I dan perang dunia ke II, hingga akhirnya pada tanggal 4 Februari 1948, Ceylon merdeka dengan status *dominion*. Dan pada tahun 1972, Ceylon menjadi negara Republik dan mengganti namanya menjadi Sri Lanka secara resmi.

Setelah memperoleh kemerdekaan Sri Lanka justru dihadapkan pada konflik antar etnis di tahun 1983-2009. Perang sipil Sri Lanka yang dikenal dengan perang elam antara pemerintah Sri Lanka dan kelompok separatis LiberationnTigers of Tamil Eelam atau Macan Tamil (selanjutnya disebut LTTE)

selama 26 tahun berhasil diakhiri pada tahun 2009. Akhir dari perang sipil terjadi setelah pemerintah Sri Lanka memperoleh kemenangan atas LTTE. Konflik terbuka antara keduanya sebenarnya telah muncul sejak masa pendudukan kolonial Inggris ketika Sri Lanka masih bernama Ceylon. Namun situasi menjadi lebih buruk sejak kelompok militan LTTE melakukan penyerangan terhadap pemerintah Sri Lanka sebagai upaya mereka untuk berpisah dan mendirikan Negara Tamil Merdeka yang dikenal dengan nama Tamil Eelam.

Konflik awalnya terjadi dengan melibatkan dua etnis utama yang mendiami Sri Lanka yaitu Sinhala yang merupakan etnis mayoritas memeluk agama budha dan Tamil yang merupakan etnis minoritas yang memeluk agama Hindu. Kuasa atas pemerintahan secara mutlak dipegang oleh Sinhala. kemunculan kebijakan diskriminatif semakin meningkatkan eskalasi konflik antara dua etnis, terbukti dengan diberlakukannya hukum "Sinhala Only" pada 1956 yang mengganti bahasa resmi Sri Lanka dari bahasa Inggris menjadi bahasa Sinhala. Kebijakan tersebut diikuti dengan dikeluarkannya konstitusi yang mengakui agama Budha sebagai satusatunya agama resmi Sri Lanka.

Kebijakan Sinhala Only yang disahkan oleh Perdana Menteri S.W.R.D Bandaranaike merupakan kebijakan yang menjadi dasar dijadikannya bahasa sinhala sebagai bahasa nasional membuat banyak penduduk Tamil menjadi pengangguran dan jatuh miskin karena tidak menguasai bahasa sinhala dalam bidang pekerjaan.<sup>37</sup>

Adanya diskriminasi ini kemudian menjadi awal mula munculnya gerakan separatis Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) yang dibentuk oleh ekstrimis Tamil. Kelompok ini melakukan penyerangan untuk pertama kalinya di tahun 1983 dan menewaskan 13 tentara Sri Lanka. Peristiwa ini kemudian menimbulkan kerusuhan anti Tamil di ibu kota Kolombo yang menewaskan ratusan orang Tamil dan menjadi awal mula terjadinya perang sipil di Sri Lanka yang dikenal dengan nama perang Elam yang kemudian diikuti dengan perang Elam lainnya.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Sri Lanka untuk mengakhiri perang saudara ini. Upaya mediasi dan perundingan damai menjadi fokus utama

---

<sup>37</sup> Fatrakhul Yusa |, "Peran Diaspora Tamil dalam Konflik Sri Lanka Tahun 2002-2010", Analisis Hubungan Internasional, vol. 3 No. 3, 2014, hal. 106

penyelesaian konflik yang dilakukan pemerintah Sri Lanka di samping penggunaan militer dalam skala sempit untuk menekan pasukan LTTE. Seiring dengan gagalnya upaya perundingan karena penolakan dari kelompok LTTE, pemerintah Sri Lanka pun mengubah strategi untuk menghadapi LTTE dari perundingan dengan jalan damai menjadi berkeinginan untuk melakukan penyerangan total (total offensive) ke markas kelompok LTTE dan penyerangan puncak terjadi di tahun 2009. Penyerangan ini menewaskan Velupillai Prabhakaran yang merupakan pemimpin kelompok LTTE dan menandakan kemenangan bagi pihak Pemerintah Sri Lanka.<sup>38</sup>

Rentetan konflik etnis dan agama masih terus terjadi bahkan hingga saat ini. Konflik etnis antara Sinhala dan Tamil dan dilanjutkan konflik agama pasca perang sipil. Konflik yang terjadi mulai pengeboman gereja, penindasan dan kebencian terhadap wanita muslim, dimana para ekstremis secara aktif mulai mendorong propaganda anti-Muslim, hingga berkolusi dengan pemerintah, serta keusahan lainnya yang terus terjadi.

Berangkat dari ancaman baik di tingkat global, regional dan nasional menuntut negara Sri Lanka untuk dapat meningkatkan kemanan agar dapat mengatasi setiap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang datang baik dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu sangat urgen pemerintah sri lanka untuk membuat kebijakan anggaran dan fiskal yang tepat untuk memperkuat organisasi militer pemerintah sri lanka.

Kemanan suatu negara harus didukung dengan pertahanan yang kuat sehingga mampu mencegah gangguan-gangguan dan ancaman yang muncul terhadap keamanan negara. Terlaksananya kemampuan pertahanan dan keamanan suatu negara tentunya membutuhkan daya dukung anggaran.

Penting sekali pemerintah mendukung organisasi militer Sri Lanka, karena kehebatan suatu negara dilihat dari kekuatan angkatan bersenjatanya. Apabila organisasi militernya kuat maka, negara tersebut akan disegani oleh negara-negara lain. Menurut teori offense-defense yang dirumuskan oleh Stephen Van Evera. Teori ini mengatakan dimana terjadi suatu fenomena aksi dan reaksi antara

---

<sup>38</sup> Nyoman End Triana GayatriA, dkk, "*Strategi Pemerintah Sri Lanka dalam Menangani Kelompok Liberation Tigers of Tamil Eelam(LTTE)*", Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2009, hal.2

beberapa negara. Jika suatu negara meningkatkan keamanannya hal itu akan berakibat atau dianggap melemahkan keamanan negara lain.

Hubungan internasional dalam situasi politik yang kian memanas membuat gesekan-gesekan antar negara semakin tak terhindarkan. Sehingga setiap negara harus mempersiapkan pasukan militernya bila sewaktu-waktu terjadi konflik yang berakibat fatal hingga menimbulkan peperangan. Bila melihat sejarah militer Sri Lanka dan perkembangannya hingga saat ini yang dilakukan oleh pemerintah Sri Lanka disebut dengan defensive, artinya Sri Lanka bersikap defensive membuat semacam bentuk persiapan militer baik dari personel maupun senjata demi menjaga keamanan negara dan rakyatnya.



## BAB IV

### PENUTUP

#### 14. Kesimpulan

Berangkat dari permasalahan dan pembahasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Sri Lanka adalah sebuah negara pulau yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki letak strategis, yaitu berbatasan laut dengan India di sebelah barat laut dan utaranya, sedangkan sebelah barat dayanya berbatasan dengan Maladewa. Karena itu sebenarnya negara ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, namun kekayaannya selalu menyusut karena dirundung konflik dan perang yang tak kunjung padam.

Negara Sri Lanka termasuk yang paling royal dalam membelanjakan anggaran untuk keperluan militer, terutama di masa-masa negara tersebut sedang mengalami konflik dan kerusuhan antara etnis Sinhala dengan etnis Tamil. Namun pada tahun 2018 pemerintah Sri Lanka mulai mengurangi anggaran belanja militernya menjadi USD 1.710 Juta, dari USD 1.867 Juta di tahun 2017.

Situasi geopolitik global yang memanas dan peristiwa-peristiwa di kawasan regional sama-sama akan berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap stabilitas ekonomi dan politik Sri Lanka. Namun yang paling banyak menguras anggaran belanja negara adalah untuk menangani konflik antar etnis dan pemberontakan dalam negeri yang berkepanjangan. Inilah yang membuat anggaran militer Sri Lanka membengkak dari tahun ke tahun. Namun pasca konflik, Sri Lanka mulai mengurangi jumlah anggaran belanja militernya.

Selain itu berkurangnya pengalokasian belanja militer Sri Lanka juga karena situasi perekonomian negara terus merosot. Padahal negara Sri Lanka sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang luar biasa namun, aksi teror dan juga gangguan keamanan dalam negeri selama ini membuat beberapa sektor ekonomi

terimbas, misalnya pada sektor pariwisata turun drastis. Buntutnya adalah perekonomian negara menjadi tidak stabil dan cenderung menurun

Pemerintah juga harus mengalokasikan dana untuk revitalisasi dan pemulihan negara pada bidang sosial, ekonomi maupun infrastruktur yang hancur pasca konflik. Karenanya itu tentu pengalokasian anggaran belanja negara yang tersedia harus di manage dengan baik dan proporsional. Karena itu anggaran pada pos belanja militer pasti akan tidak sebanyak dulu. Karena dialokasikan untuk sektor lain. Anggaran militer juga sangat bergantung pada kesediaan pemerintah dan rakyat mendanai kegiatan militer di negara tersebut. Dengan kata lain anggaran militer negara Sri Lanka dipengaruhi oleh situasi politik dan keamanan dalam negeri yang tidak stabil.

Secara formal Sri Lanka telah mengadopsi konsep *good governance*. Namun pada prakteknya hal itu tidak berjalan dengan baik. Alasan mengapa negara ini belum sepenuhnya menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik sebenarnya akar masalahnya terletak pada sistem dan budaya pemilu di Sri Lanka. Dimana sejak kemerdekaan, sistem pemilu yang dianut oleh negara Sri Lanka adalah sistem proporsional yang mana para kandidatnya adalah orang-orang yang memiliki kepentingan politik dan memenangkan pemilu dengan berbiaya kampanye yang tinggi. Sistem tersebut menyebabkan terjadinya kekerasan dan pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan pemilu. Hal ini tentu saja berdampak langsung pada supremasi hukum yang merupakan salah satu prinsip dasar tata kelola yang baik.

Jadi sistem demokrasi dan budaya pemilu yang berlaku di negara Sri Lanka inilah yang menjadi salah satu hambatan praktis dari praktik tata kelola pemerintahan yang baik. Apabila tata kelola yang baik gagal dipraktikkan oleh lembaga pemerintahan maka akan mempengaruhi semua elemen vital negara seperti perekonomian, pembangunan bahkan keamanan negara.

## **15. Rekomendasi**

Karena anggaran militer negara Sri Lanka dipengaruhi oleh situasi politik dan keamanan dan ekonomi dalam negeri yang tidak stabil, maka adalah tugas para penyelenggara negara untuk menciptakan stabilitas politik, ekonomi dan



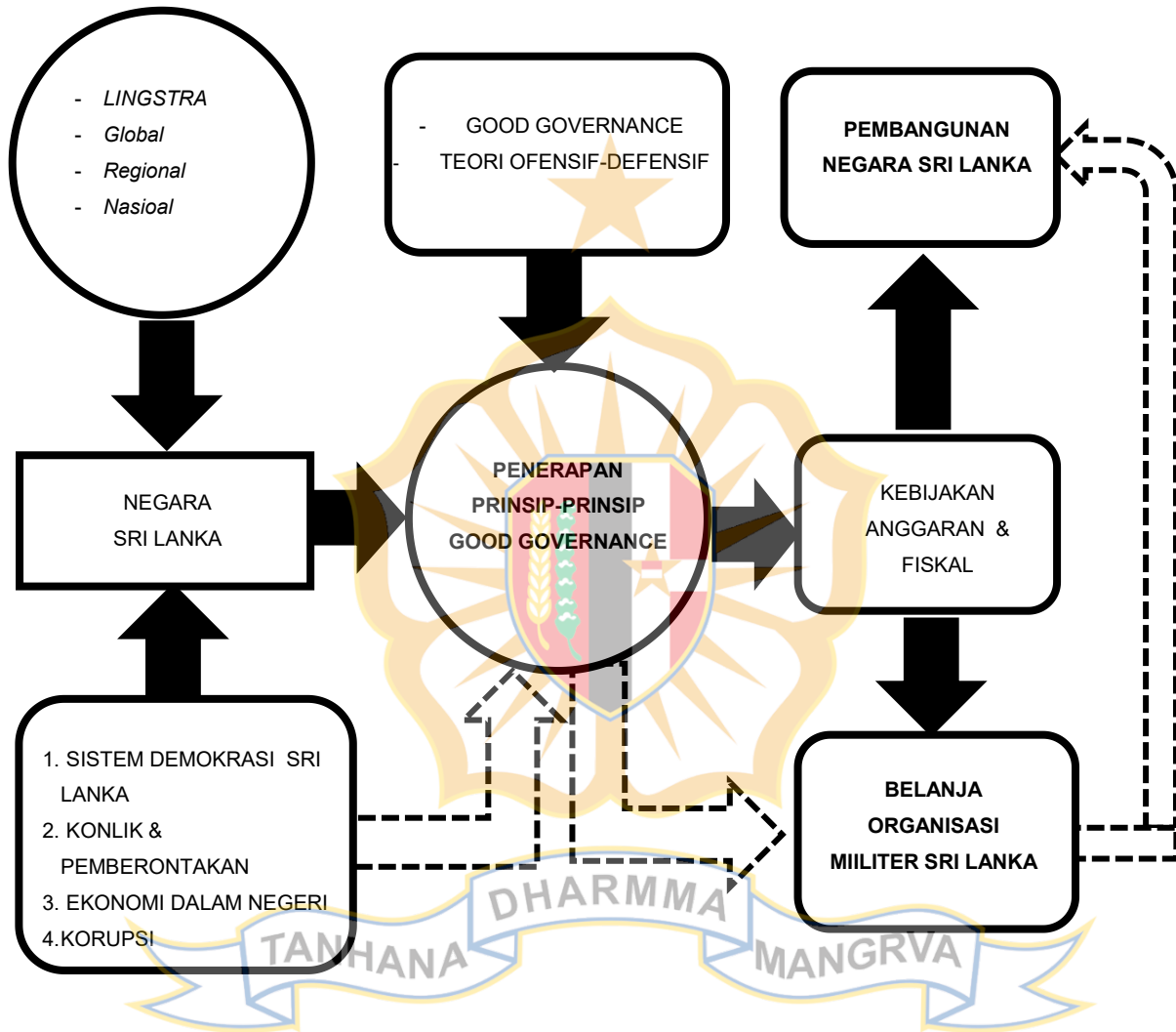
keamanan dalam negeri yang kondusif. Eksekutif termasuk Militer, dan legislatif Sri Lanka harus bekerja secara profesional dan bersih. Sementara sistem demokrasi dan penyelenggaraan politik yang konservatif dan diterapkan di Sri Lanka harus di perbaiki.

Karena soal keamanan suatu negara bukanlah sesuatu yang dapat ditawar-tawar maka pemerintah Sri Lanka seyogyanya mengambil langkah-langkah yang seimbang dalam menetapkan anggaran belanja untuk pertahanan dan keamanan saat ini, dengan memperhatikan pengaruh lingkungan strategis baik di tingkat global, regional maupun nasional. Untuk itu politik Luar negeri Sri Lanka juga harus di dorong dalam upaya menciptakan kerjasama regional dan internasional untuk mendorong politik dan keamanan global.

Beberapa peluang untuk tetap dapat mempertahankan anggaran militer yaitu dengan merancang suatu postur pertahanan sedemikian rupa sehingga anggaran rutin tidak terlalu besar karena peningkatannya bersifat tetap. Jika selalu mempertahankan postur anggaran secara konservatif, maka akan mengurangi peluang pengembangan dan pemeliharaan kapasitas pertahanan negara. Untuk itu diperlukan komitmen nasional untuk mengalokasikan sejumlah sumber daya nasional tertentu untuk pertahanan negara, serta perencanaan pertahanan yang obyektif dan rasional baik dari segi besaran maupun alokasinya sehingga militer dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Rekomendasi terakhir dari penulis mengusulkan agar pemerintah negara Sri Lanka yang *notabene*-nya sudah mengadopsi *good governance*, harus menerapkan dan menjalankan konsep dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik guna mengurangi peluang penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan maupun anggaran yang terjadi selama ini. Prinsip-prinsip ini juga membrikan kesempatan publik dapat memastikan sistem pemerintahan negara dijalankan dengan baik dan bersih. Syarat ini adalah juga merupakan jaminan untuk mencapai tujuan dan kepentingan nasional Sri Lanka.

**ALUR PIKIR  
KEBIJAKAN ANGGARAN DAN FISKAL DALAM MENDUKUNG  
ORGANISASI MILITER**



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Referensi

Umar, Husein. 2003. Strategic Manajemen In Action.

Fadjar, Abdul Mukthie. 2016. Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum. Malang: Setara Press.

Najih, Mokhammad. 2014. Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum. Malang: Setara Press.

Prasetya, Sukma Perdana. 2014. Geografi Politik sebagai Penguatan Wawasan Kebangsaan. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

------. 2020. Materi Pokok Bidang Studi Strategi. Bahan Ajar Lemhannas.

------. 2020. Materi Pokok Bidang Studi Hubungan Internasional. Bahan Ajar Lemhannas.

### Jurnal

Nicolae Todea dan Anca Calin , “The Budget, An Instrument For Planning, 2010, Annals of the University of Oradea: Economic Scienc”, Annals of Faculty of Economics, vol. 1 No. 2, 2010, hal.1

Zaini Ibrahim, “Pengantar Ekonomi Makro, (Lembaga Peneelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat”, IAIN Sultan Maulana Hasanudin, Banten, 2013, hal. 193.

Erin Damayanti , “Teori Politik Keuangan Publik Dan Kebijakan Anggaran”, Universitas Brawijaya, 2015, hal. 7

Krisna Nur Affandi, “Sri Lanka Sebagai PermataSamudra Hindia”, Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP PGRI. Madiun, 2014, hal. 4

Implementasi dari Kebijakan dan Rencana Perencanaan Fisik Nasional Sri Lanka 2010-2030”, Departemen Perencanaan Fisik Nasional, Dokumen Negara Sri Lanka, 2010

Devi Ratri Mahanani, Skripsi : “Stagnasi South Asian Association For Regional Cooperation (Saarc) Dalam Mengupayakan Kerjasama Di Asia Selatan” (Surakarta: UNS, 2018), hal.3

Dede Rosyada, Dkk, “Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani”, UIN Syarif Hidayatullah, 2000, hal 182

Fadhil Alghifari dan Raja Nathania Olga Letticia, “Analisis Teori Offense-Defense Terhadap Reformasi Kebijakan Pertahanan Jepang Dalam Dinamika Keamanan Di Asia Timur”, Jurnal Politik Internasional, 2016, hal. 20.

Posma Sariguna Johnson Kennedy, “Tantangan Pertahanan Dan Ekonomi Indonesia Serta Kebijakan Yang Perlu Dilakukan”. Management Journal Volume. 2 No.1, 2017, hal. 70

Chaminda Athapattu Mudalige P. Wijyaratne, Skripsi : “Hubungan Sipil-Militer Di Post-Konflik Sri Lanka: Konsolidasian Sipil Yang Berhasil Dalam Wajah Politik” (Monterey: Naval Postgraduate School, 2015), hal.66

Shantha Gamlath, ”Dilema Adaptasi Prinsip Tata Kelola yang Baik dalam Sistem Pemerintahan di Sri Lanka”. Internasional Ilmu Humaniora & Sosial. Vol.5 no.8, 2017, hal. 228

GH Addink, “Tata Kelola yang Baik: Pentingnya Praktek, Teori dan Definisi”. Universitas Halu Oleo. Vol.1 No.1, 2017, hal. 17

### **Peraturan Perundang-undangan**

Konstitusi Republik Sosialis Demokratis Sri Lanka edisi Revisi tahun 2015

### **Sumber Lain**

Anggaran Belanja Militer Singapura, 2018 Terbesar di ASEAN, 12 Januari 2020, (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/12/anggaran-belanja-militer-singapura-2018-terbesar-di-asean>, Diakses pada 26 Juli 2020, 23:14)

Sri Lanka Army Establishment (<https://www.army.lk/establishment>, pada 07 Juli 2020, pukul 19.15 WIB

Military expenditure as a share of GDP, (<https://knoema.com/atlas/Sri-Lanka/Military-expenditure-as-a-share-of-GDP>, Diakses pada 24 Juli 2020, 22:28)

Anggaran Militer Dianggap Belum Ideal, 1 April 2019, (<https://koran.tempo.co/read/nasional/441245/anggaran-pertahanan-dinilai-belum-ideal?>, Diakses pada 24 Juli 2020, 22:23)

Pengertian Negara Menurut Para Ahli, 27 Februari 2020, (<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/27/150000469/pengertian-negara-menurut-para-ahli?page=all>, Diakses pada 24 Juni 2020, 22:04)

BBC, Krisis ekonomi akibat Covid-19: IMF perkiraan 'luka ekonomi' karena krisis global akibat pandemi virus corona lebih buruk dari perkiraan, 25 Juni 2020, (<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53168814>, diakses pada 22 Juli 2020, pukul 11:50)

Demi Pelabuhan, Sri Lanka Terjerat Utang Besar ke China, CNBC Indonesia, 2 November 2019, (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20191102063550-4-112143/demi-pelabuhan-sri-lanka-terjerat-utang-besar-ke-china>, diakses pada 22 Juni 2020, 21:18)

Infeksi Covid-19 Melonjak, Sri Lanka Tiadakan Kampanye Pemilu, (<https://dunia.rmol.id/read/2020/07/13/443292/infeksi-covid-19-melonjak-sri-lanka-tiadakan-kampanye-pemilu>, pada 15 Juli 2020, pukul 15.50 WIB)

Perang Dingin AS-China Lebih Mengerikan dari Corona?, 22 Juni 2020, (<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4285555/perang-dingin-as-china-lebih-mengerikan-dari-corona>, Diakses pada 22 Juni 2020, 21:47)

Sejarah Kekerasan di Sri Lanka, Hubungannya dengan Aksi Pengeboman dan ISIS, National Geographic Indonesia, 29 April 2019, (<https://nationalgeographic.grid.id/read/131710402/sejarah-kekerasan-di-sri-lanka-hubungannya-dengan-aksi-pengeboman-dan-isis?page=all>, Diakses pada 24 Juli 2020, 21:46)

Sri Lanka yang Terus Koyak karena Konflik SARA, 29 April 2019

(<https://tirto.id/sri-lanka-yang-terus-koyak-karena-konflik-sara-dm8n>,

Diakses pada 25 Juli 2020, 21:30)

Pelarangan Hijab di Sri Lanka Picu Kebencian terhadap Wanita Muslim, 24 Mei

2019 ([https://www.matamatapolitik.com/analisis-hijab-direnggut-pelecehan-](https://www.matamatapolitik.com/analisis-hijab-direnggut-pelecehan-wanita-muslim-sri-lanka-picu-kebencian/)

[wanita-muslim-sri-lanka-picu-kebencian/](https://www.matamatapolitik.com/analisis-hijab-direnggut-pelecehan-wanita-muslim-sri-lanka-picu-kebencian/), Diakses pada 25 Juli 2020, 21:31)

Sri Lanka's post-war defence budget: A systematic review, Daily Mirror, 5

Februari 2020 ([http://www.dailymirror.lk/features/Sri-Lankas-post-war-](http://www.dailymirror.lk/features/Sri-Lankas-post-war-defence-budget-A-systematic-review/185-182511)

[defence-budget-A-systematic-review/185-182511](http://www.dailymirror.lk/features/Sri-Lankas-post-war-defence-budget-A-systematic-review/185-182511), Diakses pada 25 Juli

2020, 20:26)

Unprecedented military budget in Sri Lanka, 19 Oktober 2012

(<https://www.wsws.org/en/articles/2012/10/slec-o19.html>, 25 Juli 2020,

21:26)

Sri Lanka Military Spending/Defense Budget 1960-2020

([https://www.macrotrends.net/countries/LKA/sri-lanka/military-spending-](https://www.macrotrends.net/countries/LKA/sri-lanka/military-spending-defense-budget)

[defense-budget](https://www.macrotrends.net/countries/LKA/sri-lanka/military-spending-defense-budget), Diakses pada 25 Juli 2020, 21:24)

Tony Firman, "Kerusuhan Anti-Muslim dan Ancaman Ekstremis Buddhis di Sri

Lanka" ([https://tirto.id/kerusuhan-anti-muslim-dan-ancaman-ekstremis-](https://tirto.id/kerusuhan-anti-muslim-dan-ancaman-ekstremis-buddhis-di-sri-lanka-cFTZ)

[buddhis-di-sri-lanka-cFTZ](https://tirto.id/kerusuhan-anti-muslim-dan-ancaman-ekstremis-buddhis-di-sri-lanka-cFTZ), Diakses pada 26 Juli 2020, 22:27)

Ardi Priyatno Utomo, "Gereja Katolik Sri Lanka Maafkan Pelaku Bom Minggu

Paskah"

([https://www.kompas.com/global/read/2020/04/12/212423670/gereja-](https://www.kompas.com/global/read/2020/04/12/212423670/gereja-katolik-sri-lanka-maafkan-pelaku-bom-minggu-paskah?page=all)

[katolik-sri-lanka-maafkan-pelaku-bom-minggu-paskah?page=all](https://www.kompas.com/global/read/2020/04/12/212423670/gereja-katolik-sri-lanka-maafkan-pelaku-bom-minggu-paskah?page=all), Diakses

pada 26 Juli 2020, 20:23)



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama Lengkap : Kumarapatabendige Sanjeeva Anuradha  
Fernando Rwp Rsp
2. Pangkat/N.R.P : Brigadir Jendral
3. Tempat Tanggal Lahir : 31 Maret 1969
4. Asal Kesatuan/Pengiriman :Kebijakan Anggaran dan Fiscal Dalam  
Mendukung organasasi Militer
5. Jenis Kelamin : Laki-Laki
6. Status Keluarga : Sudah Menikah
7. Agama/Suku : Kristen
8. Alamat : !53/B Dippitigoda ,Dalugama ,Sri Lanka
9. No. Telepon : 81387066476
10. Kemampuan Bahasa
  - a. Asing : English, Indonesia, India
  - b. Daerah : Sinhala

